

**ANALISIS KEPENTIGAN AUSTRALIA DI DALAM *TRANS-PACIFIC*
PARTNERSHIP (TPP): 2015-2018**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh :

M. ALVIN WIRAPRADHANA M

16323095

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**ANALISIS KEPENTINGAN AUSTRALIA DI DALAM *TRANS-
PACIFIC PARTNERSHIP (TPP): 2015-2018***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

M. ALVIN WIRAPRADHANA M

16323095

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Kepentingan Australia Di Dalam *Trans-Pacific Partnership*

(TPP): 2015-2018

SKRIPSI

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan
Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
10 Desember 2020

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial

Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

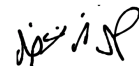
(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.)

NIK. 123230101

Dewan Penguji:

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.
2. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
3. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.

Tanda Tangan







PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Alvin Wirapradhana M
No. Mahasiswa : 16323095
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Analisis Kepentingan Australia Di Dalam *Trans-Pacific Partnership*
(TPP): 2015-2018

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan hanya karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 17 Desember 2020

Yang Menyatakan,


M. Alvin Wirapradhana M

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orangtua

Atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat dan semangat yang tak terhingga, yang telah diberikan selama ini

Saudara dan Keluarga Besar

Terima kasih atas doa, nasehat dan bantuan yang telah diberikan selama ini

Diri saya

Terima kasih atas segala kerja keras serta semangat dalam memotivasi diri untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

Rekan-rekan HI UII Angkatan 2016

Terima kasih atas kebersamaan dan perjuangan bersama selama kuliah di HI UII

HALAMAN MOTTO

*“Never give up on what you really want to do.
The person with big dream is more powerfull
then the one with all facts”*

(Albert Einstein)

*“All our dreams can come true if we have
the courage to pursue them”*

(Walt Disney)

*“He who cannot change the very fabric of his
thought will never be able
to change reality”*

(Anwar Sadat)

PRAKATA

Segala Puji bagi Allah *subhanallahu wa ta'allah* Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan dan dukungan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada bagi penulis
2. Kedua orang tua saya Ayahanda Zacharia Mulyanto dan Ibunda Ade Sulistyawati yang tiada henti turut mendoakan dan mendukung saya dalam segala hal. Terima kasih telah mencintai, menyayangi dan mempercayai saya untuk kuliah di Universitas Islam Indonesia. Tanpa dukungan dari keduanya, mungkin saya tidak akan bisa berproses menjadi lebih baik dan dewasa di lingkungan yang baru. Sekali lagi Terima Kasih banyak untuk segala pengorbanan dan tetes demi tetes keringat yang jatuh. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan kesehatan dimanapun berada.

3. Saudara kandung yaitu Adik Chantika Salsabila yang senantiasa memberikan doa, semangat serta dukungan kepada penulis.
4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D.
5. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, saran, solusi hingga waktunya. Tanpa beliau penulis tidak akan menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.
8. Seluruh dosen Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama berproses dalam masa perkuliahan sampai saat ini. Tak lupa pula penulis menyampaikan terimakasih kepada Mba Mardiatul Khasanah selaku staff jurusan yang sudah sangat membantu seluruh proses administrasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kawan-kawan seperjuangan Wanjay Squad diantaranya Abror, Afdhol, Afif, Al, Aldi, Anas, Bim, Ezha, Farchan, dan Rangga atas pertemanan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan

rasa persaudaraan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan. Tetap pegang teguh slogan kita “Main Bareng, Wisuda Bareng”, walaupun realita tidak selalu seperti yang diharapkan.

10. Teman-teman HI UII 2016 yang telah menemani kegiatan saya selama masa perkuliahan. Terima kasih atas pertemanan selama masa perkuliahan.
11. Refinda Rahima Nugrahani, terimakasih yang sebanyak-banyaknya telah menjadi penyemangat dan pengingat yang baik, sekaligus teman dalam berproses selama perkuliahan ini. Terimakasih atas setiap dukungan, motivasi dan juga saran yang telah diberikan. Terimakasih untuk setiap waktu dan hari-hari yang sangat menyenangkan telah terlewati bersama selama di Yogyakarta. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah.
12. Semua pihak yang turut membantu penulis baik dalam bentuk doa, bantuan materi, nasihat, dukungan serta dukungan moril kepada penulis.

DAFTAR ISI

<i>HALAMAN PENGESAHAN</i>	<i>iii</i>
<i>PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK</i>	<i>iv</i>
<i>HALAMAN PERSEMBAHAN</i>	<i>v</i>
<i>HALAMAN MOTTO</i>	<i>i</i>
<i>PRAKATA</i>	<i>ii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>v</i>
<i>DAFTAR SINGKATAN</i>	<i>vii</i>
<i>DAFTAR LAMPIRAN</i>	<i>viii</i>
<i>ABSTRAK</i>	<i>ix</i>
<i>BAB I</i>	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
1.1 Latar Belakang	<i>1</i>
1.2 Rumusan Masalah	<i>5</i>
1.3 Tujuan Penelitian.....	<i>5</i>
1.4 Signifikansi Penelitian.....	<i>6</i>
1.5 Cakupan Penelitian.....	<i>6</i>
1.6 Tinjauan Pustaka.....	<i>7</i>
1.7 Landasan Konsep/Teori/Model	<i>12</i>
1.8 Metode Penelitian.....	<i>16</i>
A. Jenis Penelitian	<i>17</i>
B. Subjek dan Objek Penelitian	<i>17</i>
C. Metode Pengumpulan Data	<i>17</i>
D. Proses Pengumpulan Data	<i>18</i>
<i>BAB II</i>	<i>20</i>

<i>POLITIK LUAR NEGERI AUSTRALIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN TPP</i>	20
2.1 Kebijakan Kerjasama Perdagangan dalam Politik Luar Negeri Australia ..	20
2.1.1 Perubahan Kebijakan Luar Negeri dan Perdagangan Australia.....	21
2.2 Pengaruh Politik Domestik Terhadap Kebijakan Kerjasama	25
2.3 Australia didalam TPP	29
2.3.1 Kerjasama Australia dengan Negara anggota TPP.....	31
<i>Joint Statement on the Establishment of a Strategic Partnership between Australia and Viet Nam</i>	32
2.3.2 Dampak TPP bagi Australia.....	34
<i>BAB III</i>	37
<i>KEPENTINGAN AUSTRALIA DI DALAM TPP BERDASARKAN MOTIF EKONOMI</i>	37
3.1 <i>Defensive</i> : Bertahannya Australia dalam TPP	39
3.2 <i>Political</i> : Kepentingan Australia dari segi politik dalam TPP	45
3.3 <i>Strategic</i> : TPP Sebagai Perjanjian Dagang Yang Strategis Bagi Masa Depan Australia	48
<i>BAB IV</i>	54
<i>PENUTUP</i>	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Rekomendasi.....	58
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	59

DAFTAR SINGKATAN

ACLFTA	: <i>Australia-Chile Free Trade Agreement</i>
AANZFTA	: <i>ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement</i>
ANZCERTA	: <i>Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement</i>
ANZUS	: <i>Australia, New Zealand, United States Security Treaty</i>
APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
AUSFTA	: <i>Australia-United States Free Trade Agreement</i>
CANATA	: <i>Canada-Australia Trade Agreement</i>
DFAT	: <i>Department of Foreign Affairs and Trade</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
FTA	: <i>Free Trade Agreement</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
HAKI	: <i>Hak Kekayaan Intelektual</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
JAPEA	: <i>Japan-Australia Economic Partnership Agreement</i>
MAFTA	: <i>Malaysia-Australia Free Trade Agreement</i>
PAFTA	: <i>Peru-Australia Free Trade Agreement</i>
PDB	: <i>Produk Domestik Bruto</i>
PTA	: <i>Preferential Trade Agreement</i>
PTAs	: <i>Preferential Trade Agreements</i>
RCEP	: <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
SAFTA	: <i>Singapore-Australia Free Trade Agreement</i>
TPP	: <i>Trans Pacific Partnership</i>
UKM	: <i>Usaha Kecil Menengah</i>
U.S.	: <i>United States</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel

Tabel 2.1 Kerjasama Perdagangan Australia Bersama Negara Anggota TPP

.....31

ABSTRAK

Secara umum, analisis mengenai kebijakan ekonomi dan perdagangan telah banyak menjadi isu penelitian, terutama pada saat terjadi peningkatan dan dinamika dalam kerjasama antar negara. Kerjasama perdagangan menjadi bagian penting bagi keberlangsungan ekonomi sebuah negara. TPP menjadi sebuah kerjasama perdagangan multi-kawasan yang cukup fenomenal dengan skala perdagangan yang cukup besar dilakukan antar anggotanya. Keikutsertaan dan bertahannya Australia dalam TPP menjadi sebuah pertanyaan, mengingat pendapatan dan peningkatan ekonomi yang akan didapatkan Australia cukup kecil. Berdasarkan beberapa penelitian memproyeksikan Australia tidak akan mendapatkan keuntungan besar dalam TPP. Oleh sebab itu, bertahannya Australia dalam TPP tidak hanya didasari oleh kepentingan ekonomi, melainkan kepentingan politik. Australia menjadi salah satu negara yang menjadikan kerjasama perdagangan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi tetapi lebih fokus terhadap kepentingan politik, mengingat urusan politik luar negeri dan perdagangan disatukan dalam DFAT. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis kepentingan Australia terkait dengan keikutsertaan dan bertahannya Australia dalam TPP dengan berbagai dampak negatif dan kerugian ekonomi. Analisis dilakukan dengan model ekonomi yang dikembangkan Ann Capling dengan tiga variabel yaitu *defensive*, *political*, dan *strategic* untuk menjawab alasan dan kepentingan dari Australia dibalik keikutsertaan dan bertahannya didalam TPP.

KATA KUNCI: Australia, TPP, Isu perdagangan, Isu Politik, Kebijakan Perdagangan, *Defensive*, *Political*, *Strategic*

ABSTRACT

In general, analysis of economic and trade policies has become a research issue, especially when there is an increase and dynamics in cooperation between countries. Trade cooperation is an important part of the economic sustainability of a country. TPP is phenomenal multi-regional trade cooperation with a fairly large scale of trade carried out between its members. The participation and survival of Australia in the TPP is a question, given the income and economic growth that Australia will get is quite small. Based on several studies, it is projected that Australia will not get a big advantage in the TPP. Therefore, Australia's survival in the TPP was not only based on economic interests but political interests. Australia is one of the countries that has made trade cooperation not only for economic interests but more focused on political interests, considering that foreign policy and trade affairs are united in DFAT. In this study, the authors will analyze Australia's interest in relation to Australia's participation and survival in the TPP with various negative impacts and economic losses. The analysis was carried out with an economic model developed by Ann Capling with three variables, namely *defensive*, *political*, and *strategic* to answer the reasons and interests of Australia behind participating and staying in the TPP.

KEYWORDS: Australia, Defensive, Political, Politics Issues, Strategic, TPP, Trade Issues, Trade Policy

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian Trans-Pasific Partnership (TPP) merupakan sebuah kesepakatan perdagangan bebas yang disusun pada tahun 2015, dengan melibatkan negara yang memiliki kawasan regional berbeda-beda. TPP adalah salah satu bentuk kerjasama perdagangan yang terbesar di dunia karena beranggotakan negara dengan multi-kawasan. Terdapat 12 negara yang ikut dalam TPP dengan lokasi geografis, budaya, kepentingan, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda yaitu Australia, Selandia Baru, Jepang, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Vietnam, Meksiko, Chili, Peru, Amerika Serikat (AS), dan Kanada. Anggota TPP memiliki tingkat pendapatan produk domestik bruto sekitar 40% dari PDB keseluruhan global dan hampir 37% perdagangan dunia dilakukan oleh anggota TPP (Group, 2017).

Dengan tingkat perbedaan ekonomi yang cukup signifikan dan jumlah anggota yang banyak, bukan satu-satunya faktor yang cukup unik yang ada di dalam perjanjian perdagangan dan investasi TPP. Salah satu tujuan utama pembentukan perjanjian Trans-Pacific Partnership adalah menghilangkan tarif dan di wilayah negara anggota. Namun di Tahun 2017 tepatnya pada bulan Januari, salah satu anggota TPP yaitu Amerika Serikat melalui sang Presiden Donald J. Trump memutuskan untuk menandatangani surat penarikan diri

Amerika Serikat dari keanggotaan TPP atas dasar alasan kepentingan nasional (Post, 2018).

Untuk saat ini pengurangan tarif dalam TPP belum benar-benar dilakukan. Pemberlakuan tarif hanya dilakukan antar anggota yang bersifat bilateral. Beberapa negara anggota masih menjalankan kebijakan perlindungan dalam perdagangan yang cukup tinggi. Kanada memiliki tarif untuk barang impor yang berasal dari Selandia Baru, Jepang menerapkan tarif untuk barang yang berasal dari Kanada, dan Australia memiliki tarif untuk barang dari Jepang. Terdapat hambatan dalam mengimplementasikan perjanjian yang timbul dari tarif bilateral. Tarif tersebut diukur berdasarkan jarak antarnegara, semakin jauh jarak antara kedua negara semakin besar tarif bilateral mereka. Namun, beberapa negara anggota TPP tidak melakukan perlindungan terhadap pasar domestiknya terbukti dari penerapan tarif yang hampir nol oleh Singapura dan negara anggota lainnya (Cerdeiro, 2016).

Tidak hanya itu, TPP juga berfokus pada berbagai isu tata kelola termasuk peraturan domestik. Aspek-aspek lain dari perjanjian tersebut termasuk di dalamnya aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan, menerapkan perlindungan dan bantuan terhadap perusahaan milik negara, dan juga membahas tentang transparansi dan anti-korupsi yang penting bagi keberlangsungan perjanjian TPP.

Di dalam perjanjian Trans-Pacific Partnership tercantum dan telah disepakati beberapa tujuan-tujuan. Pembangunan dan pengembangan sebuah perjanjian multi-regional (multi kawasan) yang meliputi banyak hal untuk meningkatkan dan memajukan integrasi ekonomi, terutama perdagangan

bebas dan investasi merupakan tujuan TPP. Di dalam perjanjian, anggota TPP sama-sama bertanggung jawab untuk mengutamakan kepuasan konsumen, berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas dan standar hidup, dan memastikan terealisasinya pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, bertujuan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial, menggiatkan kesempatan bisnis yang baru, serta membuka dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di masing-masing wilayah anggota TPP.

Di balik tujuan-tujuan yang disusun dalam TPP, ada kekhawatiran terkait proses negosiasi yang dilakukan masing-masing negara anggota. Australia khususnya, dalam merealisasikan perjanjian tersebut harus melalui beberapa tahap, salah satunya membutuhkan persetujuan anggota parlemen yang memakan waktu sehingga dapat berpengaruh terhadap terlambatnya proses realisasi kebijakan tersebut.

Tidak hanya itu, hambatan lainnya adalah cukup sulit untuk mendapatkan akses pada rancangan perjanjian dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga berpengaruh pada terlambatnya proses negosiasi dan hanya dapat menggunakan kebijakan yang bersifat sementara, tidak berdasarkan kebijakan yang ditetapkan secara sistematis untuk pembuatan perjanjian. Mekanisme-mekanisme tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam rangka meningkatkan transparansi dan partisipasi, tetapi terdapat keterbatasan dan kesulitan dalam menyeimbangkan prinsip negosiasi yang terbuka dengan menerima masukan dari masyarakat (Sheargold, 2016).

Perdebatan terus berlanjut termasuk pada dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut terhadap ekonomi negara anggota. Dari data yang dihimpun oleh *World Bank*, Australia menjadi negara anggota TPP yang berada pada posisi kedua sebagai negara yang hampir tidak mendapatkan dampak positif atau keuntungan setelah Amerika yang keluar lebih dahulu dari perjanjian perdagangan TPP. Studi tersebut menunjukkan bahwa TPP hanya akan meningkatkan ekonomi Australia sekitar 0,7% dan ekspor sekitar 5% pada tahun 2030 (Group, 2017).

Data tersebut diperoleh dari asumsi yang digunakan berdasarkan pada aturan kumulatif, hambatan perdagangan, dan liberalisasi pasar. Dari keseluruhan simulasi tersebut menghasilkan peningkatan PDB sekitar 0,4-10% bagi negara anggota TPP sehingga dapat dikatakan perolehan keuntungan Australia tersebut cukup kecil (Group, 2016). Selain itu, TPP diproyeksikan dapat menyebabkan kerugian bagi para pekerja dengan total 771.000 pekerja kehilangan pekerjaan termasuk Australia (Chowdury, 2016). Sementara produksi untuk ekspor meningkat, tetapi hal tersebut dapat menurunkan produksi untuk pasar domestik karena adanya persaingan produk impor. Dengan memangkas biaya tenaga kerja dapat menjadikan bisnis lebih kompetitif yang akan secara negatif mempengaruhi pendapatan.

Tidak hanya itu, dampak negatif TPP lebih dirasakan Australia salah satunya menimbulkan permasalahan pada masyarakat yaitu kesulitan dalam mengakses kesehatan seperti meningkatnya harga obat-obatan. Naiknya harga obat-obatan tersebut merupakan dampak dari sulitnya industri farmasi di Australia untuk berkembang dan tidak adanya kesempatan bagi industri

tersebut untuk mengembangkan inovasi akibat dari perjanjian TPP (Australia M. , 2015). TPP dapat melakukan monopoli pada obat-obatan yang dipatenkan dengan membuat obat generik yang lebih murah dan memblokir pengembangan dan ketersediaan obat-obatan baru yang serupa dengan maksud menguasai pasar. Perjanjian tersebut kemungkinan dapat menutup pasar bagi produsen obat generik yang lebih murah dan mencegah program subsidi yang membuat harga obat tetap terjangkau di Australia (Chowdury, 2016). Dari pemaparan yang telah disampaikan di atas, tulisan ini mencoba untuk menganalisis kepentingan Australia terkait keikutsertaannya dalam perjanjian perdagangan Trans-Pacific Partnership.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan mengkaji lebih dalam mengenai kepentingan politik domestik Australia terkait keikutsertaannya dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Mengapa hingga kini Australia bertahan dalam perjanjian perdagangan bebas TPP ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepentingan politik luar negeri dan kebijakan perdagangan Australia dalam perjanjian TPP.
2. Untuk mengetahui kebijakan politik domestik Australia dan bagaimana posisinya dalam perjanjian perdagangan TPP.
3. Untuk mengetahui mengapa Australia ikut serta dalam perjanjian TPP dibalik semua kerugiannya.

1.4 Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana kepentingan politik Australia di dalam TPP di balik segala dampak negatif bagi perekonomian Australia. Penelitian ini dianggap penting karena melihat kondisi ekonomi Australia yang tetap dalam kondisi stabil dan mengalami peningkatan tanpa ada pengaruh dari perjanjian TPP. Selanjutnya, banyak peneliti yang telah melakukan penelitian tentang dampak perjanjian TPP terhadap kondisi ekonomi Australia, tetapi tidak melihat kepentingan domestik yang mempengaruhi kebijakan politik Australia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini peneliti mencoba untuk melihat permasalahan tersebut dari sisi yang berbeda dengan menganalisis dan mengkaji lebih dalam pengaruh kepentingan politik domestik Australia.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus untuk meneliti permasalahan mengenai keterlibatan Australia di dalam perjanjian TPP sejak Oktober 2015 hingga 2018 yang termasuk kedalam lingkup kajian politik ekonomi internasional dan ekonomi politik. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis kepentingan politik Australia di balik dampak negatif yang ditimbulkan perjanjian dagang TPP bagi kondisi ekonomi Australia. Keikutsertaan Australia di tahun 2015 dalam perjanjian dagang TPP justru diproyeksikan akan melemahkan pendapatan ekonomi Australia dari sektor perdagangan. Hal ini menarik karena, hingga di tahun 2018 Australia tetap bertahan dalam TPP yang berpotensi dapat merugikan secara ekonomi.

Menarik untuk diperhatikan bahwa kepentingan politik terlihat lebih dominan dibandingkan kepentingan ekonomi Australia di dalam TPP. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji dan menganalisis faktor kepentingan politik domestik Australia serta bagaimana hal tersebut mampu menahan Australia dalam perjanjian dagang TPP yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Australia.

1.6 Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai kebijakan ekonomi Australia dapat dibaca dalam artikel yang ditulis oleh David Robertson yang secara garis besar membahas mengenai dengan kebijakan perdagangan Australia yang sangat dipengaruhi oleh nilai dan kepentingan partai-partai, terutama partai pemenang pemilu. Kebijakan terkait dengan peningkatan tarif perdagangan dan perlindungan terhadap pasar menjadi salah satu kebijakan yang dijalankan untuk meningkatkan ekonomi Australia. Kebijakan tersebut dilakukan terhadap hampir semua mitra kerjasama Australia. Pemberian tarif dan perlindungan terhadap pasar di satu sisi tidak sesuai dengan beberapa perjanjian pasar bebas yang dilakukan oleh Australia. Namun, hal tersebut harus dilakukan sebagai strategi untuk mengurangi kerugian ekonomi dan melindungi industri domestik. Secara keseluruhan tulisan tersebut memandang bahwa kebijakan kerjasama dan perdagangan Australia adalah bentuk dari liberalisasi ekonomi. Namun, masih terdapat hambatan tarif impor dan tidak menjalankan pasar bebas seperti yang semestinya (Robertson, 1997).

Dinamika mengenai kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan Australia juga menjadi isu yang diteliti oleh Mohan Malik dalam tulisannya

yang berjudul *Australia, America, and Asia* (Malik, 2006). Kerjasama antara Australia dengan Amerika memberikan keuntungan yang kecil. Kehadiran Tiongkok dalam kerjasama perdagangan justru mampu meningkatkan ekonomi Australia. Namun, hal tersebut menjadi ancaman bagi Amerika sebagai aliansi utama Australia. Australia membutuhkan kerjasama dengan Tiongkok sebagai pasar utama produk bahan mentah Australia dan jalan masuk ke dalam pasar kawasan Asia. Namun, di sisi lain hubungan kerjasama perdagangan dengan Amerika harus tetap berjalan. Menurut Malik dalam menyikapi hal tersebut Australia menerapkan *Hedging Strategy* untuk mengamankan kepentingannya. Secara garis besar tulisan tersebut melihat bahwa terdapat dua kepentingan utama yang dipegang oleh Australia terkait hubungan kerjasamanya dengan Amerika dan Tiongkok. Terlepas dari konflik antara Amerika dan Tiongkok, kepentingan strategis dan aliansi dengan Amerika menjadi prioritas Australia.

Senada dengan Malik mengenai kerjasama Amerika dan Australia, Ranald memandang bahwa kerjasama kedua negara dalam AUSFTA hanya memberikan keuntungan yang kecil dan defisit bagi Australia (Ranald, 2011). Dalam mengurangi dampak tersebut, pemerintah Australia mendukung diberlakukannya kerjasam perdagangan bebas yang lebih komprehensif yaitu TPP. Dengan adanya TPP diharapkan dapat membuka akses pasar Amerika bagi produk-produk Australia. Namun, Ranald dalam tulisannya melihat bahwa TPP justru tidak akan membawa dampak yang lebih signifikan dibanding AUSFTA bagi Australia. TPP merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas yang diprakarsai oleh Amerika Serikat sebagai salah satu

strategi dalam memperluas pasar dan pengaruh di kawasan Asia Pasifik. Untuk mewujudkan hal tersebut, Amerika mendorong untuk dibuatnya regulasi-regulasi mengenai sengketa antara investor dengan negara dan membatasi hak kekayaan intelektual yang mengikat secara hukum. Secara tidak langsung hal tersebut dapat merugikan kebijakan mengenai perlindungan pasar terhadap industri agribisnis dan farmasi yang dilakukan oleh pemerintah Australia. Secara garis besar Renald memandang bahwa TPP dapat memberikan kerugian bagi industri-industri agrikultur dan farmasi, serta tidak berpengaruh besar pada peningkatan ekonomi Australia.

Arthur Stamoulis dalam tulisannya memiliki pandangan yang serupa bahwa TPP hanya akan memberi kerugian bagi negara yang mengikutinya. Akan tetapi sedikit berbeda dengan Ranald, Stamoulis melihat bahwa TPP dibuat untuk memberikan keuntungan kepada para pemodal atau investor dengan menanamkan investasinya ke negara-negara yang memiliki standar upah pekerja rendah seperti Vietnam (Stamoulis, 2013). Keberadaan TPP tidak hanya dapat merugikan negara, tetapi lebih jauh lagi dapat berpotensi menimbulkan ledakan pengangguran. Masalah lain yang harus dihadapi adalah ketidaksetaraan standar upah pekerja di masing-masing negara anggota dalam kaitannya dengan aturan ILO (Organisasi Buruh Internasional). Menurut Stamoulis pemerataan standar akan berdampak baik bagi pekerja, namun di sisi lain memaksa negara untuk mengadopsi aturan-aturan yang sebelumnya belum dijalankan.

Senada dengan apa yang telah disampaikan Ranald mengenai haki dalam TPP, Stamoulis berpendapat bahwa hal tersebut berpotensi merugikan

negara. Negara harus mengadopsi regulasi mengenai penyelesaian sengketa antar negara dengan investor, yang secara tidak langsung memberikan hak kepada para investor atau korporasi dalam menekan negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Hal tersebut dilakukan untuk membantu negara menarik kepercayaan para investor dan perusahaan transnasional untuk berinvestasi di negara-negara anggota TPP (Stamoulis, 2013).

Dari apa yang telah disampaikan beberapa penulis di atas seperti Ranald dan Stamoulis dapat dikatakan bahwa TPP dapat membawa kerugian ekonomi negara. Melalui tulisannya Binoy Kampmark meneliti lebih jauh lagi terkait dengan rancangan TPP. Kampmark melihat bahwa rancangan yang dimuat didalam TPP hanya memberikan keuntungan bagi pihak korporasi seperti perusahaan-perusahaan transnasional (Kampark, 2016). Tidak hanya itu, perusahaan domestik terutama farmasi terancam oleh persaingan pasar bebas yang memungkinkan hadirnya obat-obatan yang lebih murah. Masalah lingkungan turut menjadi perhatian karena tidak adanya pengawasan dan aturan mengenai pencemaran polusi dan terkait dengan penggunaan sumber daya seperti eksploitasi hutan. Terdapat hambatan dalam menentukan regulasi untuk melindungi lingkungan dalam TPP karena tidak adanya kesepakatan antar anggota. Sama halnya yang telah disampaikan oleh Ranald dan Stamoulis, Kampmark menuliskan bahwa TPP melalui mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara dapat menghilangkan peran dari pengadilan domestik dan internasional. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai langkah untuk melindungi keuntungan atau laba dari perusahaan atau investor.

Pandangan yang telah disampaikan oleh Robertson dan Malik mengenai kebijakan perdagangan Australia cukup banyak menyampaikan bagaimana pemerintah Australia merumuskan dan menjalankan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Selain itu, Robertson tidak melihat bahwa pemberian tarif perdagangan yang dilakukan Australia dapat merugikan ekonomi Australia jika negara lain melakukan hal yang sama atau bahkan menghentikan kerjasama. Berbeda dengan Malik yang kurang menjelaskan pengaruh Amerika dalam setiap kebijakan politik luar negeri Australia. Malik tidak melihat bahwa pengaruh ekonomi politik pada saat ini jauh lebih kuat daripada keamanan.

Tulisan yang disampaikan Ranald, Stamoulis, dan Kampark dapat dikatakan hampir senada dan membahas terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh TPP. Mereka melihat TPP dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian negara, industri lokal, dan bagi para pekerja. Banyak hal yang masih harus dibenahi di dalam TPP terkait dengan regulasi-regulasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ketiga penulis tersebut tidak membahas mengenai faktor politik yang menarik negara-negara untuk ikut kedalam TPP. Keberadaan Amerika di dalam TPP tidak dibahas secara mendalam oleh penulis, terutama setelah Amerika menarik diri dari perjanjian yang diinisiasinya tersebut.

Penelitian ini akan mencoba untuk melihat dari sisi yang berbeda di mana penulis akan melihat dari pengaruh politik domestik dan luar negeri Australia terhadap pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri yang berdampak pada perdagangan. Penulis juga akan membahas mengenai

bagaimana strategi yang dijalankan Australia terkait dengan isu-isu ekonomi global.

1.7 Landasan Konsep/Teori/Model

Dalam rangka untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah, penulis akan menggunakan model ekonomi *defensive*, *political*, dan *strategic* yang telah dikembangkan dan di tulis oleh Ann Capling dalam artikelnya yang berjudul “*Australia’s Trade Policy Dilemmas*” (Capling, 2008). Dalam tulisannya, Capling mencoba melihat perubahan kebijakan perdagangan berdasarkan 3 variabel utama *defensive*, *political*, dan *strategic* dengan melihat pengaruh dari kondisi politik domestik dan kepentingan ekonomi dari negara tersebut. Untuk menjelaskan model ekonomi yang digunakan, Capling dalam artikel tersebut menggunakan Australia sebagai subjek penelitian. Capling dalam tulisannya, mengkaji bagaimana pengaruh kepentingan politik domestik didalam kebijakan politik luar negeri dan kebijakan kerjasama perdagangan dan hubungan diplomatik Australia dengan negara lain.

Model ekonomi Capling pada dasarnya menggunakan kepentingan negara dan politik dalam menganalisis bagaimana suatu kebijakan ekonomi, kerjasama, dan perdagangan dibentuk oleh pemerintahan Australia. Urusan mengenai politik luar negeri dan perdagangan Australia diurus oleh DFAT, sehingga kepentingan politik luar negeri berpengaruh besar pada kebijakan perdagangan Australia. Dalam hal ini, Australia mencoba untuk menjaga kepentingannya dalam segi ekonomi dengan memperbanyak kerjasama PTAs.

Kerjasama PTAs memberikan keuntungan ekonomi yang lebih banyak, lebih cepat, dan dapat menjaga akses pasar Australia. Dengan model ekonomi

Capling, dapat dilihat bahwa Australia melakukan hal tersebut untuk tetap menjaga pasar bagi produknya dan melindungi sektor industri utama Australia melalui perjanjian dagang PTAs. Capling menilai fenomena tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi semata, melainkan terdapat pengaruh politik dan kebijakan domestik yang dijelaskan dengan tiga variabel yaitu: *defensive*, *political*, dan *strategic* (Capling, 2008).

Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian yaitu mengenai keikutsertaan dan bertahannya Australia di dalam TPP. Untuk menjawab hal tersebut, penulis akan menganalisis draft dan kebijakan politik luar negeri Australia dengan tiga variabel (*defensive*, *political*, dan *strategic*) dari model ekonomi Capling. Model ekonomi tersebut dirasa tepat karena membahas tentang perubahan kebijakan perdagangan akibat dinamika ekonomi dan politik.

Perubahan kebijakan perdagangan Australia bergantung pada draft *white paper*, kepentingan politik, dan kondisi ekonomi negara. Dengan tradisi liberal yang kuat dan bagian dari WTO mendorong Australia untuk ikut berperan menciptakan pasar bebas. Berada dikawasan Pasifik yang cukup dekat dengan kawasan Asia, menempatkan Australia sebagai salah satu negara dengan tradisi liberal di wilayah timur. Hal ini menjadi salah satu peluang Australia untuk berperan dalam menciptakan dan membuka akses pasar bebas di wilayah Asia-Pasifik dan memperluas kerjasama perdagangan.

Dalam penelitian ini, model ekonomi tersebut paling tepat untuk digunakan sebagai alat dalam menganalisis permasalahan kepentingan dan kebijakan domestik Australia yang membuatnya bertahan dalam kerjasama

perdagangan TPP dengan melihat kebijakan perdagangan dan politik berdasarkan motif *defensif*, *political*, dan *strategic*. Penggunaan model ekonomi dengan tiga motif *defensif*, *political*, dan *strategic* akan mampu menjawab rumusan masalah. Dengan melihat model ekonomi dengan motif yang telah dijelaskan oleh Capling, maka kebijakan perdagangan Australia sangat dipengaruhi oleh faktor politik. Faktor politik dapat menjelaskan perubahan-perubahan kebijakan dengan menganalisis tiga motif:

1. *Defensif*

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan turut merubah preferensi kerjasama perdagangan antar negara. Dalam hal ini, keuntungan ekonomi bukan menjadi tujuan utama Australia ikut kedalam kerjasama TPP. Kepentingan untuk menciptakan pasar bebas menjadi salah satu alasan Australia ikut dan bertahan dalam TPP. Keikutsertaan Australia dalam TPP dinilai sebagai bentuk *defensif* atau antisipatif Australia untuk mempertahankan dan menjaga akses pasar terhadap mitra dagangnya. Banyak mitra dagang Australia yang cenderung mengedepankan PTAs membuat pemerintah khawatir kehilangan akses terhadap pasar perdagangan.

Kerjasama PTAs dilihat dapat menjadi masalah bagi Australia jika tidak ditanggulangi dengan cepat. Dampak yang dapat ditimbulkan salah satunya berpotensi besar mendorong terjadinya PHK bagi pekerja industri karena kehilangan akses pasar bagi produk yang dihasilkan. Dinamika di dalam kerjasama ekonomi tersebut mendorong Australia bersikap lebih terbuka dengan melindungi dan mengamankan akses, serta membuka pasar bebas terhadap mitra-mitra dagang lain dalam kerjasama TPP.

2. *Political*

Dalam menentukan berbagai kebijakan khususnya perdagangan, politik domestik dan luar negeri sangat berpengaruh bagi Australia. Keikutsertaan Australia dalam kerjasama TPP dilihat sebagai bentuk penyesuaian Australia dengan draft kebijakan politik yang telah disusun. Selain itu, ikutsertanya Australia dapat dikatakan sebagai motif politik untuk turut menyebarkan pengaruh ekonomi liberal di sekitar kawasan. Dengan melihat data prediksi *world bank*, fokus Australia dalam mengikuti TPP tidak hanya berorientasi pada keuntungan belaka, melainkan sebagai inisiatif politik untuk membuka pasar bebas, integrasi ekonomi, dan mengimplementasikan *draft* yang telah disusun dalam *white paper* Australia.

Beberapa kebijakan perdagangan yang dilakukan Australia mendorong munculnya berbagai kontroversi di domestik. TPP yang seharusnya memberikan keuntungan ekonomi bagi Australia, justru diprediksi dapat menimbulkan kerugian. Kerjasama tersebut dapat menciptakan permasalahan bagi industri-industri domestik yang menjadi komoditas utama perdagangan Australia karena kompetisi di pasar bebas. Secara ekonomi TPP kurang memberikan keuntungan yang signifikan bagi Australia. Namun selain hal tersebut, terdapat tujuan politik yaitu untuk menjaga dan memperluas akses pasar di kawasan Asia-Pasifik dan mempertahankan mitra kerjasama menjadi sangat penting bagi pemerintah Australia.

3. *Strategic*

Bertahannya Australia hingga saat penelitian ini dilakukan dalam TPP dengan berbagai prediksi dan persepsi negatif menjadi sebuah tanda tanya.

Dengan besarnya pengaruh politik dalam berbagai kepentingan Australia, keikutsetaanya ini dapat dipahami sebagai langkah tepat mengingat TPP sebagai kerjasama yang strategis untuk mewujudkan kepentingan Australia baik ekonomi dan politik kedepannya. Dinamika dunia internasional yang selalu berubah-ubah mendorong setiap negara termasuk Australia untuk mempertahankan perannya terutama dalam kawasan demi menjaga kepentingan. Australia memiliki kepentingan besar dalam TPP untuk mewujudkan hubungan kerjasama yang kuat dan integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, dengan tujuan utama menciptakan pasar bebas dan memperkuat kerjasama.

Kerjasama perdagangan TPP sebagai salah satu kerjasama yang dapat digunakan Australia untuk tujuan strategis. Dengan mewujudkan liberalisasi pasar atau pasar bebas di kawasan dengan merangkul seluruh mitra didalam satu kerangka kerjasama multi-kawasan TPP. Keikutsertaan Australia dalam TPP sebagai sebuah kerjasama strategis dan politik dapat dipahami sebagai cara untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya di dalam kawasan mengingat bahwa Amerika Serikat telah keluar dari kerjasama TPP.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif, melihat pentingnya penggunaan data-data dan analisis guna menjawab kepentingan Australia dalam TPP. Penelitian dengan metode kualitatif biasa digunakan sebagai metode utama yang dilakukan dalam meneliti ilmu sosial dan politik. Hal ini disebabkan oleh sifat ilmu sosial yang mendasarkan pengetahuannya pada dinamika interaksi sosial sebagai sebuah fenomena abstrak yang tidak

dapat sepenuhnya dihitung dalam angka. Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik kajian pustaka dari berbagai dokumen, jurnal, buku, berita, laporan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian yang dipelajari dan ditelusuri sebelumnya.

A. Jenis Penelitian

Penerapan metode kualitatif dalam riset ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Australia dalam perjanjian perdagangan TPP. Hasil penelitian ini bersifat analisis dan deskriptif akan sesuai dengan menggunakan metode kualitatif. Setelah data didapatkan dan dikumpulkan, maka proses pengolahan data dapat dilakukan yang hasilnya akan menjadi sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih Australia menjadi subjek utama dalam tulisan ini sebagai salah satu anggota kerjasama TPP. Objek penelitian dalam tulisan ini yaitu mengenai keikutsertaan dan bertahannya Australia dalam TPP.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka dari berbagai dokumen, jurnal, buku, berita, dan laporan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari laporan-laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi terkait negara Australia. Sedangkan data sekunder yang

digunakan penulis berasal dari jurnal, berita, dan data yang dikeluarkan oleh badan-badan penelitian mengenai isu ekonomi dan isu politik Australia.

D. Proses Pengumpulan Data

Proses penelitian adalah menyangkut perencanaan atau langkah dalam melakukan riset, dimulai dari pra riset sampai laporan penelitian. Pentingnya prosedur ini adalah sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan riset. Oleh karena itu, riset ini akan dilakukan melalui beberapa prosedur:

1. Pra Riset

Pra riset mencakup kegiatan untuk persiapan riset. Ini termasuk: melihat hasil laporan terkait penelitian, membaca bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian.

2. Pengambilan Data

Riset ini akan mendapatkan data dari sumber sekunder. Sumber sekunder akan dipilih dari berbagai media tertulis, mencakup: buku teks akademis, majalah berkala, pernyataan resmi pemerintah Australia dan publikasi, dan surat kabar harian. Pemilihan sumber sekunder didasarkan pada reputasi kredibilitas media / penerbit dan hubungannya dengan topik riset.

3. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, tahap penting berikutnya adalah menganalisis data. Langkah-langkah dalam menganalisa data diambil dari analisis data dalam rancangan riset kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah:

a. Mengorganisir dan menyiapkan data

Langkah pertama ini berfokus pada mengumpulkan semua data yang dikumpulkan dari semua sumber.

b. Membaca semua data

Untuk memahami data yang dikategorikan, semua data perlu dibaca secara menyeluruh. Selama proses ini dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian beberapa elemen data. Saat membaca data, langkah pertama adalah membaca bahan dengan cepat. Tujuan dari proses ini adalah memilih materi terkait dan mengidentifikasi pernyataan atau argumen terkait.

c. Pengkodean

Proses pengkodean melibatkan upaya pelabelan/ pengkategorian data tertentu dalam riset. Kisaran kode dapat dikembangkan selama proses analisis.

d. Mengaitkan tema/deskripsi

Fase ini melibatkan proses penggambaran kategori dan tema. Kategori dan tema diidentifikasi selama proses pengkodean. Fase ini juga bertujuan untuk Menemukan korelasi antara tema dan kategori.

e. Interpretasi arti

Tahap terakhir dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan dalam riset ini adalah untuk menafsirkan makna data. Interpretasi adalah tindakan menjelaskan sesuatu, dalam hal ini adalah catatan wawancara dan dokumen terkait.

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI AUSTRALIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN TPP

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya dalam latar belakang dan landasan teori. Pada bab ini penulis akan menganalisis politik luar negeri Australia dalam menjalin sebuah kerjasama. Analisis dalam tulisan ini akan melihat faktor ekonomi dibalik politik luar negeri Australia. Tulisan ini akan dibagi dalam dua bagian, pertama mengidentifikasi kebijakan kerjasama luar negeri Australia. Kedua, mengidentifikasi kerjasama TPP dan keikutsertaan Australia di dalam perumusannya.

2.1 Kebijakan Kerjasama Perdagangan dalam Politik Luar Negeri Australia

Politik luar negeri Australia disusun berdasarkan kepentingan negara yang tertuang didalam draft kebijakan yang biasa disebut dengan *Australia White paper*. Draft tersebut kembali dikeluarkan pada tahun 2017 berisikan mengenai strategi, kepentingan, dan kerangka kerja pemerintah Australia dalam menjalankan kebijakan luar negeri dan hubungan kerjasama baik politik, keamanan, dan ekonomi. Strategi dan kebijakan dibuat untuk beradaptasi terhadap perubahan dan dinamika ekonomi, serta peta kekuatan global. Hal tersebut penting sebagai langkah antisipatif dalam menjaga kepentingan Australia di kancah internasional. Dalam perkembangannya draft tersebut disusun untuk mengikuti perubahan dan dinamika dalam dunia ekonomi dan politik Internasional.

2.1.1 Perubahan Kebijakan Luar Negeri dan Perdagangan Australia

Sejak lama kebijakan politik luar negeri Australia diketahui fokus kepada pembangunan kerjasama yang dapat meminimalisir hambatan tarif dan non-tarif. Sebagai salah satu negara dengan daya saing ekonomi rendah, Australia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam mengadakan kerjasama perdagangan (Ravenhill A. C., 2015). Namun, posisi yang kurang baik tersebut tidak didukung dengan kebijakan perdagangan yang baik. Masih adanya hambatan non-tarif pada beberapa sektor perdagangan justru semakin memperburuk posisi Australia. Hal ini akan sangat mempengaruhi kegiatan ekspor produk, sehingga dapat merugikan Australia dari segi pendapatan dan keuntungan.

Tidak dipungkiri bahwa beberapa kerjasama yang dilakukan Australia bukan hanya bertujuan untuk kepentingan ekonomi dan mendapatkan keuntungan saja. Salah satunya adalah kerjasama yang telah dijalin bertahun-tahun antara Australia dan Amerika menjadi salah satu contoh kerjasama yang memberi kerugian ekonomi bagi Australia. Kerjasama tersebut justru hanya menghasilkan deficit ekonomi bagi Australia, sedangkan *surplus* bagi Amerika. Namun, kerjasama yang dijalin oleh Australia tersebut secara garis besar didasari oleh kepentingan politik dan keamanan (Malik, 2006).

Dari beberapa dekade yang lalu menunjukkan bahwa kebijakan kerjasama Australia lebih banyak mengarah pada hubungan bilateral. Kerjasama bilateral cenderung lebih banyak digunakan dalam dunia perdagangan yang hingga saat ini seluruh negara melakukannya. Kemudahan dalam melakukan kerjasama, penyusunan regulasi, penyelesaian konflik, dan penentuan tarif menjadi keunggulan kerjasama bilateral. Kerjasama ini lebih dikenal dengan PTAs yang

memiliki fungsi dan tujuan untuk mempermudah jalinan kerjasama perdagangan. Berbagai negara termasuk Australia menggunakan PTAs sebagai salah satu langkah untuk melakukan kerjasama terutama perdagangan.

Sebagai salah satu produk ekspor utama, barang tambang menjadi prioritas Australia dalam menentukan kerjasama guna membuka pasar bagi produk tersebut. PTAs dinilai cukup efektif untuk melindungi kepentingan Australia untuk menjaga sektor industri tambang sebagai komoditas utama dan meraih keuntungan. Kerjasama PTAs memungkinkan negara yang bekerjasama untuk menciptakan regulasi berupa penghilangan tarif dan non-tarif bagi produk tertentu. Bagi beberapa negara menghilangkan tarif sepenuhnya dengan PTAs dapat membahayakan sektor industri domestik. Snape yang dikutip Capling berkata bahwa PTAs tidak sepenuhnya berdampak positif, negara-negara cenderung melakukan kompetisi dengan menciptakan tarif impor bagi produk dari masing-masing negara yang bekerjasama (Ravenhill A. C., 2015).

Kebijakan kerjasama perdagangan Australia seiring waktu berubah mengikuti dinamika politik keamanan global dan perkembangan ekonomi dunia. Didasarkan pada *Australia Foreign Policy white paper* setiap kebijakan luar negeri Australia memiliki tujuan seperti yang terdapat dalam draft tersebut. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir draft mengalami perubahan mengikuti dinamika ekonomi dan politik internasional. Terdapat dua hal yang menjadi fokus dan prioritas kebijakan politik luar negeri Australia saat ini. Pertama menjaga komitmen untuk menjalankan aturan-aturan dalam tatanan internasional (WTO) dan membuat kebijakan yang dapat meningkatkan perdagangan (Researchers, 2017).

Sebagai negara dengan kekuatan menengah, Australia memiliki kondisi ekonomi yang dikategorikan cukup kuat dan bagus. Penting bagi Australia untuk menguatkan dan memperluas pengaruhnya ditengah kondisi politik, ekonomi, dan keamanan internasional yang tidak stabil dengan tetap mengikuti aturan dan tatanan internasional. Kawasan regional Indo-Pasifik menjadi prioritas kedua Australia dengan fokus berperan untuk menjaga stabilitas kawasan (Researchers, 2017). Dengan semakin meningkatnya ekonomi di sekitar kawasan Indo-Pasifik terutama Asia menjadi peluang besar bagi Australia untuk memperluas kerjasama dan pengaruhnya. Namun, hal tersebut dapat terhambat akibat perselisihan Amerika dan Tiongkok yang menyebabkan ketidakstabilan di kawasan.

Australia cukup sadar bahwa perselisihan tersebut dapat mengganggu sistem perdagangan multilateral dan keamanan di kawasan. Penting bagi Australia untuk tetap menjaga hubungan dengan Amerika sebagai aliansi utama. Selain itu, meningkatnya ekonomi Tiongkok secara signifikan dilihat sebagai sebuah peluang ekonomi yang cukup strategis oleh Australia bagi kawasan (Hardy, 2019). Hal tersebut menempatkan Australia ditengah-tengah untuk tetap menjaga kepentingannya terhadap kedua negara tersebut dan mendorong terciptanya perdamaian.

Sebagai jalan tepat untuk mempromosikan pengaruh dan kepentingannya, Australia telah banyak menjalin berbagai kerjasama multilateral. Dalam *White Paper* ditulis jelas tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan ekonomi Australia melalui perdagangan dan mempertegas posisi Australia didalam kawasan Indo-Pasifik yang multikultur. Hal tersebut dilakukan secara bertahap dengan menolak kebijakan proteksi dan menghilangkan hambatan tarif dan non-

tarif. Untuk mencapai tujuannya, Australia turut serta dalam berbagai kerjasama multilateral seperti RCEP, APEC, dan TPP sebagai salah satu bentuk kerjasama besar yang melibatkan banyak negara di sekitar kawasan Indo-Pasifik (Trade D. o., 2017).

Banyaknya negara yang melakukan perdagangan semakin meningkatkan persaingan dagang antar negara, selain itu juga sebagai ajang menunjukkan pengaruh dan kapabilitas negara. Kerjasama perdagangan dan investasi didalam kawasan dilakukan untuk mengurangi kompetisi dan dinamika kekuatan besar. Komitmen Australia untuk bernegosiasi dalam kerjasama TPP dan kerjasama lainnya memperlihatkan arah baru dari kebijakan perdagangan dan luar negeri Australia. Penekanan ditempatkan pada integrasi melalui hubungan bilateral dan multilateral yang mencakup kawasan yang luas sebagai kunci akan keberhasilan kebijakan luar negeri Australia dimasa mendatang (Researchers, 2017).

Bagi Australia keberadaan kerjasama TPP menjadi sangat vital bagi kepentingannya di kawasan Indo-Pasifik. Potensi ekonomi yang cukup besar dalam kawasan menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan melalui investasi, dan dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. TPP dapat menjadi salah satu jalan untuk mencapai liberalisasi pasar dikawasan dan sebagai bentuk perlawanan terhadap praktek-praktek kebijakan proteksi perdagangan, seperti yang diinginkan oleh Australia. Keterbukaan pasar akan meningkatkan hubungan ekonomi antar negara di kawasan dan secara bertahap dapat mendorong terciptanya pasar bebas antar kawasan kedepannya.

2.2 Pengaruh Politik Domestik Terhadap Kebijakan Kerjasama

Politik luar negeri Australia disusun berdasarkan kepentingan negara yang tertuang didalam draft kebijakan yang biasa disebut dengan *Foreign Policy White paper*. Draft tersebut berisikan mengenai kepentingan politik domestik pemerintah dan partai politik Australia untuk menjalankan kebijakan luar negeri dan hubungan kerjasama baik politik, keamanan, dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan merupakan bentuk dari perpanjangan kepentingan dan interaksi politik domestik, serta kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan dengan membuka hubungan kerjasama bersama negara lain **Invalid source specified**. Dimana setiap kebijakan luar negeri dibuat untuk merealisasikan kepentingan politik domestik. Politik domestik sendiri tidak terlepas dari kepentingan politik partisan didalamnya, mengingat Australia yang memiliki tradisi partai politik yang cukup kuat disetiap periode pemerintahannya.

Terdapat dua partai utama yang silih berganti mengatur politik, kepentingan, dan kebijakan Australia. Setiap partai memiliki kepentingan masing-masing dengan pemikiran dan nilai yang berbeda. Partai buruh dan liberal adalah dua dari beberapa partai di Australia yang memiliki tradisi politik cukup kuat di Australia. Dapat dikatakan bahwa kedua partai memiliki cara dan kepentingannya masing-masing dalam membangun dan memajukan Australia. Terdapat perbedaan dimana partai liberal yang menguasai Australia lebih condong untuk merumuskan kebijakan-kebijakan luar negeri yang mengedepankan keamanan, politik, dan kerjasama ekonomi strategis bersama mitra **Invalid source specified**.

Partai buruh sendiri lebih mengedepankan kawasan regional sebagai pertahanan awal dan ekonomi bagi Australia. Namun terdapat perbedaan antara kedua partai tersebut, dengan pendekatan lingkungan menjadi fokus kebijakan yang dirumuskan pemerintahan dibawah partai buruh. Tidak hanya itu, kebijakan mengenai pasar bebas dimulai oleh partai buruh dimana hal ini bertujuan untuk mendorong perekonomian untuk kemakmuran, perkembangan, dan pertumbuhan sektor pendapatan negara demi kepentingan rakyat **Invalid source specified..** Hal ini cukup menarik melihat bahwa pencetus pertama perdagangan bebas justru datang dari partai buruh, bukan dari partai liberal. Sebagai partai yang berisikan dua kelompok yaitu konservatif dan sosial, bukan hal yang tabu jika dalam partai liberal terdapat dua pandangan mengenai kebijakan pasar bebas mengingat bahwa Australia sebagai negara yang berorientasi pada perdagangan **Invalid source specified..**

Beberapa pergantian kepemimpinan sejak tahun khususnya perdana menteri sejak 2013 hingga 2018 dikuasai oleh pihak partai liberal, dengan begitu politik dikuasai oleh partai liberal. Sejak masa kepemimpinan Tony Abbott di tahun 2013 yang menggulingkan kepemimpinan Kevin Rudd dari partai buruh, partai liberal mulai menguasai politik domestik Australia **Invalid source specified..** Dengan dikuasainya politik, beberapa manuver kebijakan dibuat oleh Abbott yang salah satunya ikut serta kedalam perjanjian TPP yang merupakan sebuah kerjasama perdagangan bebas. Motif dari keikutsertaannya dalam TPP cukup jelas yaitu untuk perdagangan bebas dengan kepentingan keamanan dibaliknya. Seperti yang disampaikan Tony Abbott:

"Freer trade is an essential part of any credible plan to build a strong, prosperous economy for a safe, secure Australia" **Invalid source specified.**

Hal ini memperlihatkan bahwa perdagangan bebas menjadi salah satu tujuan kebijakan untuk kepentingan keamanan dan ekonomi pemerintahan dibawah partai liberal. Dengan kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan dan pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan dengan mempererat dan memperkuat hubungan kerjasama Australia dengan negara-negara disekitar kawasan dan mitra lainnya **Invalid source specified.** Namun, dengan banyaknya yang tidak setuju terhadap manuver politik Abbot dalam TPP termasuk menteri bawahannya, mengancam posisinya sebagai ketua partai liberal dan perdana menteri. Pada tahun 2015 tepatnya bulan september, Abbott dilengserkan dan digantikan posisinya oleh Malcolm Turnbull **Invalid source specified.**

Kebijakan mengenai keikutsertaan dalam TPP yang digalangan Abbott, dilanjutkan oleh Turnbull dengan tetap bertahan dan mengejar perjanjian tersebut **Invalid source specified.** Dengan sama-sama diusung oleh partai liberal dapat dikatakan arah kebijakan kedua orang tersebut serupa, walaupun terdapat persaingan dan kepentingan yang berbeda antar keduanya. TPP dinilai sebagai suatu perjanjian kerjasama yang dapat medantangkan keuntungan bagi Australia. Sebagai negara yang berprinsip pada menolak adanya kebijakan *protectonism*, pasar bebas dan terbuka dapat menjadi jalan agar terbukanya lapangan pekerjaan untuk jangka panjang melalui investasi **Invalid source specified.** Dalam hal ini, TPP dapat menjadi jalan pemerintahan untuk tetap berpegang teguh pada prinsip

tersebut, mengingat bahwa perjanjian ini bertujuan untuk menjalankan mekanisme pasar bebas.

Malcolm melihat bahwa keberadaan TPP akan sangat membantu peningkatan ekonomi Australia. Dengan terbukannya akses pasar baru melalui penghapusan tarif di hampir semua sektor perdagangan bagi komoditas utama Australia seperti produksi besi dan baja, farmasi, mesin, minyak, gas dan lainnya akan sangat membantu ekonomi Australia **Invalid source specified..** Disisi lain dengan lingkup kerjasama kawasan pasifik sangat membantu Australia untuk mendorong integrasi dan menciptakan keamanan. Tangku kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Scott Morrison yang menggantikan Turnbull setelah beberapa masalah yang muncul dalam politik dan parlemen Australia terkait kebijakan lingkungan **Invalid source specified..**

Dengan latar belakang yang serupa dengan pendahulunya berasal dari partai liberal, Morrison justru melihat TPP tidak hanya sebagai jalan untuk integrasi kawasan pasifik. Dengan kepentingan ekonomi untuk mengejar perjanjian perdagangan bebas dan kebijakan "*Australia First*", TPP dilihat sebagai alat untuk merealisasikan hal tersebut yang bertujuan untuk membuka peluang pasar dan akses pasar di kawasan Asia setelah keluarnya Amerika **Invalid source specified..** Kebijakan yang digalangkan oleh Morrison tersebut merupakan langkah awalnya untuk mempromosikan Australia sebagai negara yang berorientasi pada perdagangan untuk mendorong investasi masuk. Hal tersebut juga merupakan kepentingan partai Liberal yang mendorong adanya perubahan

dalam sektor investasi khususnya tambang, dimana hal ini tidak dilakukan pada masa Turnbull **Invalid source specified.**

Berbagai kebijakan dibuat merupakan bentuk dari strategi pemerintah dan partai politik Australia untuk beradaptasi terhadap kondisi dan perubahan politik domestik, serta dinamika yang terjadi dalam dunia internasional. Perubahan kekuatan ekonomi dan politik global dan konflik yang terjadi akan sangat berpengaruh baik secara ekonomi, politik, dan keamanan negara. Untuk itu, penting sebagai langkah antisipatif dalam menjaga kepentingan politik domestik Australia di kancah internasional, kebijakan TPP dibuat untuk merealisasikan berbagai kepentingan tersebut.

2.3 Australia didalam TPP

Sebagai salah satu kerjasama yang diinisiasi dan ditinggalkan oleh Amerika, tentunya TPP dapat dikatakan sebagai alat untuk mempertahankan hegemoninya. Namun, lebih jauh lagi terdapat aspek-aspek lain yang tidak hanya tentang kepentingan Amerika, salah satunya berkaitan dengan fasilitasi perdagangan, kerjasama ekonomi dan pembangunan. TPP dibuat untuk membantu meningkatkan promosi daya saing bisnis, meningkatkan fasilitas dan mendorong partisipasi usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perdagangan internasional, menjaga stabilitas rantai produksi dan persediaan, meningkatkan kesamaan dan keselarasan peraturan yang berkaitan dengan perdagangan, dan mendukung keberlangsungan pembangunan (DFAT, 2011).

Beberapa dari tujuan di atas termasuk kedalam kerangka kerja untuk kerjasama di berbagai bidang, termasuk pendidikan, industri primer, penelitian,

ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun selain itu, keberadaan TPP diharapkan juga mampu untuk mendorong agar tercapainya agenda perdagangan bebas. Dengan begitu mempermudah proses perdagangan dan membuka akses pasar yang berdampak pada peningkatan keuntungan yang didapatkan jika TPP dapat berjalan dengan baik.

Lebih penting dari sekedar keuntungan ekonomi, potensi besar TPP dapat menyatukan banyaknya PTAs di kawasan Asia-Pasifik dan mampu mempromosikan integrasi ekonomi yang lebih luas dan lebih dalam. Keberadaan TPP bagi Australia dalam hal ini dapat sangat membantu integrasi ekonomi dan mendukung tercapainya kepentingan Australia dalam kawasan Asia Pasifik. Keputusan pemerintah Australia untuk ikut TPP seperti yang disampaikan oleh mantan Menteri Perdagangan Simon Crean menekankan bahwa pentingnya “*knitting together*” atau membangun bersama-sama dan menyelaraskan aturan dalam berbagai PTAs untuk membuatnya konsisten dan sesuai dengan sistem perdagangan multilateral (Crean, 2008).

Australia diketahui menjadi salah satu negara yang mengandalkan kerjasama PTAs untuk kegiatan ekonomi. Disisi lain PTAs dapat menjadi hambatan dalam jangka panjang karena regulasi domestik terkait perdagangan yang dapat berubah-ubah mengikuti kondisi perjanjian. Dengan demikian, TPP dapat menjadi solusi dengan merangkul seluruh PTAs untuk menyelaraskan aturan dalam satu wadah kerjasama. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi perdagangan dengan semakin banyaknya anggota perjanjian maka semakin besar akses pasar yang didapatkan. Selain itu, hambatan dalam perdagangan dapat dihilangkan dengan adanya aturan baru yang harmoni dan selaras.

2.3.1 Kerjasama Australia dengan Negara anggota TPP

Kerjasama dengan berbagai negara telah dilakukan oleh Australia baik dengan negara anggota TPP dan tidak. Dari berbagai hubungan kerjasama yang telah dijalani baik dengan Selandia Baru, Jepang, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Vietnam, Meksiko, Chili, Kanada, dan Peru secara keseluruhan masih menerapkan tarif dan hambatan dalam perdagangan. Dengan kata lain kerjasama yang terjalin belum menjalankan prinsip *free trade* secara maksimal karena masih diberlakukannya pembatasan. Salah satu contohnya adalah kerjasama perdagangan antara Kanada dan Australia yang menjalankan sistem *free trade*, namun dengan pembatasan tertentu bagi beberapa produk dalam perdagangan. Adapun jenis kerjasama Australia dengan anggota TPP lain terlampir dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kerjasama Perdagangan Australia Bersama Negara Anggota TPP

Negara Mitra Dagang	FTA	PTA
Kanada		CANATA
Meksiko		Australia – Mexico Joint Experts Group On Strengthening Bilateral Economic Relations
Jepang	JAEPa	
Selandia Baru	ANZCERTA	
Singapura	SAFTA	
Malaysia	MAFTA	
Brunei	AANZFTA	
Chili	ACLFTA	

Peru	PAFTA	
Vietnam		Joint Statement on the Establishment of a Strategic Partnership between Australia and Viet Nam

Sumber: Web site Pemerintah Australia (*Departement of Foreign Affairs and Trade*)

Aturan mengenai kerjasama kedua negara tersebut tertuang dalam *Canada-Australia Tariff Agreement* (CANATA). CANATA berisikan regulasi mengenai kegiatan perdagangan kedua negara dan juga pemberlakuan tarif bagi beberapa produk-produk kedua negara (Commission A. T., *Export markets - Canada: Tariffs and regulations*, 2020). Pemberlakuan tarif yang dilakukan diikuti juga dengan adanya pembatasan kuota impor dan memerlukan izin seperti produk senjata, baja, tekstil, dan pertanian. Kerjasama yang berlaku bagi kedua negara berjalan cukup baik dilihat juga dari investasi kedua negara senilai \$40,9 milyar ditahun 2018 (Canada, 2019).

Kerjasama seperti yang dilakukan antara Australia-Kanada juga dilakukan dengan negara-negara lain termasuk Jepang yang diresmikan dalam *Japan-Australia Economic Partnership Agreement* (JAEPA). Kerjasama yang mulai dijalankan pada tahun 2015 tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Australia dan Jepang yang telah terjalin sejak tahun 1957 (Japan, 2015). JAEPA secara khusus dibuat untuk mempermudah kerjasama ekonomi kedua negara dengan sama-sama mengurangi dan menghilangkan hambatan dalam perdagangan. Bagi Australia, JAEPA menjadi salah satu kerjasama yang cukup penting dalam meningkatkan akses pasar terutama untuk produk barang, jasa, dan investasi Australia (Trade A. G., 2018).

Kerjasama dilakukan tentu saja bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan pengaruh pasar dan keuntungan ekonomi. Namun langkah kerjasama yang dilakukan tersebut tidak sejalan dengan draft *foreign policy white paper*. Tujuan Australia yang dibuat dalam *white paper* salah satunya adalah menjaga komitmen untuk menjalankan aturan-aturan dalam tatanan internasional (WTO) dan membuat kebijakan yang dapat meningkatkan perdagangan (Researchers, 2017). Disatu sisi kerjasama yang telah dilakukan berhasil meningkatkan perdagangan, tetapi tidak sesuai dengan prinsip dan aturan WTO mengenai pasar bebas dan penghapusan tarif perdagangan.

Pembuatan TPP dalam hal ini dapat sangat berpengaruh dalam memaksimalkan keuntungan ekonomi negara-negara anggotanya dengan pasar bebas. Terutama bagi Australia, dengan bergabungnya kedalam TPP dapat meringankan biaya pengeluaran karena tidak adanya tarif perdagangan. Hal ini tentu saja menjadi keuntungan besar bagi seluruh produk-produk Australia terutama produk tambang dan pertanian yang menjadi salah satu komoditas utamanya. Mengingat bahwa banyak negara yang masih menerapkan hambatan tarif cukup besar bagi produk-produk tersebut.

Selain itu, keuntungan besar juga dapat diraih melalui investasi mengingat bahwa investasi sektor energi dan tambang di Australia masih cukup besar sehingga dapat memberikan keuntungan yang besar tidak hanya bagi investor tetapi juga bagi Australia. Jika dilihat secara garis besar, keikutsertaan Australia didalam TPP tentunya diatas kertas akan memberikan dampak yang positif jika keuntungan yang dijanjikan TPP benar terwujud dan berjalan dengan semestinya. Namun, hal tersebut dapat tidak terjadi mengingat inisiator utama TPP yaitu

Amerika keluar dari perjanjian dengan alasan TPP hanya akan memperburuk ekonomi dan kondisi pekerja, serta memberikan ruang bagi negara lain untuk mengambil keuntungan yang besar dari Amerika (Taylor, 2018).

2.3.2 Dampak TPP bagi Australia

Secara garis besar berbagai aturan dan regulasi tersusun di dalam *Text of the Trans-Pacific Partnership Agreement* yang terdiri dari 30 pasal (Trade D. o., TPP text and associated documents, 2015). Setiap bab memiliki fokus masing-masing seperti mengatur mengenai hambatan teknis perdagangan, investasi, HAKI, transparansi dan anti korupsi, lingkungan, penyelesaian sengketa, dan lainnya. Aturan-aturan tersebut tentunya dibuat untuk semakin memudahkan proses kerjasama perdagangan, peningkatan ekonomi, dan penyelesaian konflik ekonomi dan perdagangan antar negara anggota TPP. Salah satu kelebihan dari TPP yaitu dibuatnya wadah untuk menyelesaikan sengketa baik antar negara anggota dan perusahaan, namun hal ini dapat menjadi bumerang bagi kedaulatan negara jika perundangan-undangan yang dibuat bertolak belakang dengan regulasi TPP.

Namun dibalik berbagai hal yang terlihat cukup positif tersebut, terdapat beberapa kerugian yang akan muncul terutama bagi Australia. Aturan dan regulasi mengenai HAKI telah tertuang di dalam perundang-undangan domestik Australia dan beberapa kali mengalami amandemen untuk mengikuti dinamika HAKI, agar dapat melindungi setiap paten, merek dagang, design, dan hak cipta (Australia I. , 2019). Keikutsertaan Australia dalam TPP akan mendorong pemerintahan untuk

merubah dan menambah beberapa undang-undang sesuai dengan regulasi yang telah disusun dalam draft TPP.

Perubahan yang dilakukan pada undang-undang terkait hambatan teknis perdagangan, investasi, HAKI, transparansi dan anti korupsi, lingkungan, penyelesaian sengketa akan sangat berpengaruh terutama pada industri farmasi dan para pekerja di Australia. TPP dapat mendorong Australia kehilangan peran dalam pengawasan obat-obatan karena perubahan kebijakan (Gleeson, 2016). Standar penilaian atau kualitas produk farmasi didasarkan pada negara dengan teknologi dan kapasitas yang lebih maju. Hal ini tentunya dapat merugikan pasar domestik Australia mengingat negara-negara dengan teknologi farmasi yang lebih maju memiliki kemampuan untuk menciptakan produk yang lebih kompetitif dan murah di pasar.

Jika hal tersebut terjadi, dampak signifikan akan dirasakan para pelaku industri farmasi. Ketika pendapatan menurun akibat kompetisi pasar maka akan menurunkan proses produksi. Hal ini dapat merugikan investor dan mendorong industri kolaps sehingga banyak pekerja yang akan kehilangan pekerjaan. Persepsi positif mengenai TPP dapat runtuh karena berbanding terbalik dengan tujuannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan secara luas bagi negara anggota dan mendorong peningkatan ekonomi. Dampak tersebut tidak dapat menjelaskan ketertarikan dan bertahannya Australia dalam TPP.

TPP menjadi salah satu kerjasama yang searah dengan perubahan kebijakan luar negeri Australia. Tujuan kebijakan Australia semakin memperhatikan ancaman dan perubahan kawasan dan dinamika ekonomi politik internasional. Ditengah gejolak ekonomi dan politik internasional, Australia dapat

memanfaatkan TPP untuk mempertahankan kepentingannya dan menjalin kerjasama yang kuat dengan negara lain. Pada bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai motif dan ketertarikan Australia dalam kerjasama TPP.

BAB III

KEPENTINGAN AUSTRALIA DI DALAM TPP BERDASARKAN MOTIF EKONOMI

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kepentingan Australia di dalam TPP. Penting bagi penulis untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepentingan Australia di dalam kerjasama TPP. Pada bab ini penulis akan menganalisis menggunakan model ekonomi yang dikembangkan Ann Capling dengan menggunakan 3 variabel utama yaitu *defensive*, *political*, dan *strategic*. Variabel *defensive*, adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk memahami kebijakan ekonomi Australia dalam melindungi akses pasar dan kerjasama perdagangan TPP. Sedangkan, variabel *political* digunakan sebagai cara dalam memahami kepentingan politik yang mempengaruhi keikutsertaan Australia di dalam kerjasama perdagangan TPP. Kemudian, variabel *strategic* dipahami sebagai suatu cara Australia dalam melihat TPP sebagai kerjasama perdagangan yang strategis untuk mewujudkan dan mengimplementasikan setiap kepentingannya.

Keikutsertaan Australia diawal dapat dikatakan sebagai sebuah langkah mempertahankan hubungan dengan Amerika, namun setelah keluarnya Amerika tidak turut mendorong Australia keluar. Hal ini menjadi cukup menarik mengingat peran Amerika yang cukup penting bagi kondisi ekonomi, politik, dan keamanan Australia. Disisi lain, dampak buruk yang diproyeksikan oleh *World bank* dan beberapa penelitian bagi perekonomian dan industri yang dapat mengalami kerugian jika Australia tetap bertahan dalam TPP.

Keberadaan TPP bagi negara-negara anggota memiliki dampak yang berbeda-beda secara ekonomi khususnya Australia, mengingat anggota TPP terdiri atas negara maju dan negara berkembang. Australia sebagai negara dengan tingkat ekonomi menengah, tidak mendapatkan keuntungan yang begitu signifikan. Hal tersebut didapat melalui perhitungan oleh salah satu peneliti IMF yang menjelaskan mengenai kemungkinan dampak yang muncul setelah penghapusan tarif dalam kerjasama TPP (Cerdeiro, 2016). Dalam perhitungan tersebut menunjukkan bahwa beberapa negara yang telah menjalin kerjasama dengan Australia tidak menunjukkan kenaikan signifikan pada pendapatan. Perhitungan tersebut menunjukkan rata-rata pendapatan setelah liberalisasi hanya pada angka 0,00-0,06%. Hal tersebut terjadi karena kerjasama yang terbentuk antara negara melalui perjanjian bilateral telah mengimplementasikan kebijakan pengurangan dan penghapusan hambatan tarif dalam perdagangan.

Selain dari perhitungan tersebut, simulasi yang dikembangkan oleh *world bank* turut menghasilkan dampak yang kurang maksimal bagi perekonomian Australia terkait keberadaannya dalam TPP. Hasilnya kenaikan GDP yang akan didapatkan hanya berkisar pada angka 0,4-10% atau rata-rata 1,1%. Perhitungan tersebut didasarkan pada tiga asumsi yaitu sumber aturan, hambatan pada layanan, dan harmonisasi aturan (Group, 2016). Asumsi tersebut disusun berdasarkan aturan dan hambatan yang berlaku bagi setiap negara anggota TPP. Aturan perdagangan tersebut masih didominasi oleh aturan bilateral yang dinilai dapat berpengaruh pada sulitnya harmonisasi dan penyesuaian aturan dan kebijakan dalam TPP, mengingat TPP mengharuskan adanya harmonisasi kebijakan terutama yang berkaitan dengan perdagangan.

Lebih lanjut, pada bab ini akan menganalisis dan membahas mengenai mengapa Australia tetap bertahan dalam TPP dan pengaruh faktor ekonomi dibalik politik luar negeri Australia. Sesuai dengan konsep dari Capling dengan menggunakan motif ekonomi untuk menjawab mengenai ketertarikan dan bertahannya Australia dalam TPP.

3.1 *Defensive: Bertahannya Australia dalam TPP*

Pada dasarnya, melindungi kepentingan nasional adalah suatu keharusan bagi setiap negara termasuk Australia. Kepentingan nasional didasarkan pada kebutuhan domestik yang dipengaruhi faktor politik, ekonomi, dan keamanan. Australia menjadi salah satu diantara banyak negara yang menjadikan politik sebagai faktor penting dalam menentukan kebijakan yang akan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan, termasuk perdagangan. Ekonomi menjadi salah satu faktor yang juga dipengaruhi politik, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan. TPP menjadi salah satu aset kerjasama yang cukup penting bagi kepentingan Australia, mengingat TPP adalah salah satu kerjasama dengan akses pasar yang sangat besar dan intra-kawasan.

Ditengah kondisi ekonomi dan perdagangan global yang semakin tidak menentu dan cenderung mengalami perlambatan mendorong pemerintah Australia untuk mencari solusi. Penambahan dan perluasan pasar menjadi langkah utama yang harus dilakukan Australia (Gouw, 2018). Capling menuliskan bahwa *defensive* dimaknai sebagai sebuah kepentingan dalam melindungi dan mempertahankan kerjasama dan akses pasar terhadap mitra dagang penting (Capling, 2008). Langkah Australia dalam mengamankan dan melindungi akses pasar untuk mempertahankan ekonomi dan kepentingan negara merupakan sebuah

kepentingan *defensive*. Jika langkah ini tidak dilakukan bukan tidak mungkin ekonomi Australia akan terpuruk walaupun dengan kemungkinan yang cukup kecil.

Berbagai kemungkinan buruk seperti prediksi *World Bank* dan beberapa dampak negatif bagi industri-industri lokal terutama farmasi sangat memungkinkan terjadi. Dalam klausul TPP, terdapat beberapa poin-poin yang menjadi fokus utama seperti regulasi mengenai hambatan teknis perdagangan, investasi, HAKI, dan transparansi dan anti korupsi. Klausul-klausul tersebut secara garis besar dapat menimbulkan kerugian bagi industri farmasi di Australia.

Klausul hambatan teknis perdagangan sesuai pasal 8 ayat 2 dan pasal 12 dalam teks perjanjian TPP:

”The objective of this chapter is to facilitate trade, including by eliminating unnecessary technical barriers to trade, enhancing transparency, and promoting greater regulatory cooperation and good regulatory practice.” (Trade D. o., 2015)

“Each Party shall administer any marketing authorisation process it maintains for pharmaceutical products in a timely, reasonable, objective, transparent, and impartial manner, and identify and manage any conflicts of interest in order mitigate any associated risks” (Trade D. o., 2015)

Dalam hal ini cukup jelas dikatakan bahwa apapun yang menghambat proses perdagangan harus dihilangkan dan proses dalam menguji suatu produk farmasi harus cepat. Badan pengawas khusus obat Australia yaitu TGA

(Therapeutic Goods Administration) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengontrol obat-obatan yang keluar dan masuk di Australia akan sangat terdampak hal tersebut (Administration, 2020). Pasal 8 ayat 2 tersebut dapat menghambat dan mengurangi peran TGA dalam mengawasi obat. Kemudian, dalam pasal 12 mengharuskan negara memiliki fasilitas yang mumpuni untuk proses pengujian obat-obatan agar dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini akan berdampak bagi Australia mengingat terdapat negara lain yang memiliki fasilitas mumpuni seperti Jepang untuk menguji obat-obatan dengan cepat. Dengan begitu, obat-obatan yang telah diuji dinegara anggota lain tidak perlu diujikan lagi dinegara tujuan dan dapat dipasarkan. Sebagai negara dengan produk farmasi sebagai salah satu penyumbang besar pendapatan ekspor dan pengawasan ketat mengenai obat-obatan, keharusan untuk harmonisasi kebijakan dalam TPP akan sangat berpengaruh besar bagi industri farmasi, pasar obat-obatan, dan pendapatan ekonomi di Australia.

Dampak tersebut secara negatif tidak hanya akan merusak ekosistem bisnis farmasi di Australia, tetapi lebih jauh lagi dapat berpengaruh pada pemutusan hubungan kerja para pekerja didalamnya (Chowdury, 2016). Pemutusan hubungan kerja sangat mungkin dilakukan oleh perusahaan-perusahaan jika produksi yang dilakukan hanya menghasilkan kerugian. TPP mendorong negara untuk membuka pasar dengan menghilangkan hambatan yang ada, dimana seharusnya hal tersebut dapat memberikan peningkatan pendapatan. Namun, kemudahan untuk akses pasar yang diberikan kepada negara mitra TPP untuk masuk ke Australia khususnya obat-obatan justru dapat merugikan secara ekonomi. Tidak diperbolehkannya negara untuk ikut campur dalam mekanisme

kerja pasar, akan mengurangi peran pemerintah Australia dalam melindungi industri domestik terutama farmasi dan beberapa produk-produk lainnya.

Namun, hal tersebut tidak dihiraukan oleh pemerintah Australia yang melihat TPP dari sisi berbeda. Kepentingan untuk melindungi akses pasar dan perannya disekitar dan diluar kawasan menjadi sangat penting bagi Australia terkait dengan keberadaannya dalam kerjasama TPP. Selain itu terdapat ancaman ditengah semakin kompetitifnya pasar dan persaingan yang kuat antar sesama negara produsen. Sebagai negara dengan produk utama perdagangan seperti barang tambang dan mineral, batu bara, emas, gas alam, daging sapi, farmasi, mesin dan peralatan, dan lainnya membuat Australia memiliki banyak pesaing, mengingat banyak negara-negara yang juga mengandalkan produk-produk tersebut (Tang, 2020).

Persaingan dan dinamika pasar global turut berpengaruh besar bagi kondisi ekonomi Australia. Ketegangan hubungan dagang antar negara besar seperti Amerika-Tiongkok mampu mengarahkan negara-negara untuk bersikap lebih berhati-hati dalam berdagang, sehingga berdampak pada penurunan aktifitas ekspor (Purnomo, 2019). Sebagai negara yang berorientasi ekspor, hal tersebut akan sangat berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Australia yang bergantung pada kegiatan perdagangan.

Demi mencegah hal tersebut terjadi, langkah yang paling tepat bagi Australia adalah menjaga dan memperluas akses pasar, dengan masuk kedalam TPP. Kebijakan TPP pasal 8 ayat 2 yang mendukung penghapusan hambatan dan mendukung perdagangan bebas, dapat mempertahankan dan meningkatkan akses pasar untuk kegiatan ekspor Australia. Kerjasama perdagangan dengan negara

mitra seperti Kanada dan Meksiko dapat meningkat, hingga tercapainya perdagangan bebas mengingat Australia belum memiliki kesepakatan perdagangan bebas dengan dua negara tersebut. Selain itu, Australia telah mencapai perdagangan bebas dengan Singapura, Chili, Malaysia, Peru, Selandia Baru, dan Jepang sebagai negara mitra penerima produk ekspor kedua terbesar Australia setelah Tiongkok (Complexity, 2020). Namun, bukan hal yang tidak mungkin negara anggota TPP lain dapat menjadi mitra besar perdagangan Australia jika TPP berjalan dengan maksimal.

Secara spesifik mengenai perdagangan dalam *foreign policy white paper* Australia, terdapat beberapa tujuan penting yaitu memprioritaskan dan mewujudkan keterbukaan pasar di kawasan Indo-Pasifik, mendukung penghapusan kebijakan proteksionisme perdagangan, dan komitmen untuk menjalankan aturan internasional untuk kemudahan kerjasama sebagai dasar pembentukan kebijakan kerjasama. Kepentingan tersebut muncul karena adanya persaingan dan ketidakpastian dalam dunia perdagangan internasional yang mendorong Australia untuk tetap mempertahankan peluang ekonomi (Government, 2017). Keberadaan TPP sebagai perjanjian kerjasama yang dapat mencakup hampir keseluruhan kepentingannya, dapat dijadikan sarana atau alat bagi pemerintah Australia untuk tetap menjalankan dan menjaga kepentingan-kepentingan tersebut.

Dengan keanggotaan multi-kawasan, menjadikan TPP sebagai pasar yang berpotensi bagi produk ekspor Australia yang didominasi oleh produk agrikultur dan pertambangan (Frindos, 2017). Dengan begitu dapat membantu Australia dalam memperluas dan mempertahankan akses pasar, serta pengaruhnya.

Kepentingan Australia dalam politik internasional tertulis dalam draft *white paper* yang salah satu tujuannya adalah menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Hal ini dapat dianalisis sebagai suatu bentuk *defensive* Australia untuk menjaga eksistensi dan akses pasar dikawasan. Selain itu, banyaknya persaingan antar kompetitor dengan produk yang homogen dapat mengancam Australia. Mengingat kawasan Indo-Pasifik adalah kawasan penting bagi Australia secara letak geografis dan dengan banyaknya kerjasama bilateral-multilateral yang dilakukan dikawasan ini membuat potensi ekonomi dan pasar semakin besar.

Apabila TPP dapat berjalan secara maksimal maka dapat menjadi alat kerjasama baru yang semakin mempermudah Australia dalam “menguasai” kawasan terlebih setelah keluarnya Amerika. Posisi Australia sebagai salah satu negara yang mengandalkan perdagangan untuk ekonomi dengan kegiatan ekspor dan impor menyumbang sekitar 42% dari PDB (Commission A. T., 2020). Keikutsertaan dan bertahannya Australia dalam TPP dapat mendorong peningkatan peran Australia sebagai negara yang berorientasi pada perdagangan dan perlahan dapat meningkatkan ekonomi seiring dengan peningkatan intensitas perdagangan dan kerjasama yang dilangsungkan dalam TPP.

Dengan adanya rencana perubahan regulasi terkait dengan keanggotaan nantinya akan mempermudah negara-negara lain bergabung, bukan tidak mungkin Tiongkok nantinya dapat bergabung dalam perjanjian TPP mengingat letaknya termasuk kedalam Kawasan Indo-Pasifik (Samosir, 2017). Jika terjadi, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan intensitas perdagangan. Kemudian akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan komoditas barang ekspor

Australia, yang secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi (Australia R. B., 2020).

3.2 Political: Kepentingan Australia dari segi politik dalam TPP

Banyak dari penjelasan sebelumnya mengenai kepentingan Australia dalam TPP terbentuk karena pengaruh politik yang cukup besar disamping adanya kepentingan ekonomi. Secara spesifik kepentingan politik Australia yang berkaitan langsung dengan TPP tertuang didalam draft *foreign policy white paper*. Segala urusan dan isi dari draft tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kementrian yang mengurus urusan luar negeri dan perdagangan Australia (DFAT). *Foreign policy white paper* Australia disusun berdasarkan pada politik dan kepentingan domestik yang didominasi oleh kepentingan pemerintahan dan partai politik. Draft tersebut memfokuskan Australia dalam menciptakan Kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, aman, sejahtera, dan dengan tujuan utama menjalin dan memperkuat kemitraan dengan seluruh negara (Trade D. o., 2017).

Dengan cakupan TPP yang cukup luas hingga melibatkan beberapa negara dengan kawasan yang berbeda-beda (News, 2017). TPP akan sangat berguna dalam membantu Australia menggapai tujuannya untuk menjalin dan memperkuat kerjasama dengan seluruh negara. Namun, untuk menggapai hal tersebut tidak mudah terutama mengingat diversitas yang cukup tinggi dalam TPP. Keinginan kuat untuk merealisasikan kepentingan dalam *white paper* yang merupakan perpanjangan dari kepentingan politik domestik menjadi salah satu alasan Australia bergabung dalam TPP.

Dalam berbagai kebijakan kerjasama yang telah dikeluarkan dan diikuti oleh Australia dapat dikatakan hampir semuanya dilakukan berdasarkan

kepentingan politik luar negeri walaupun diantaranya terdapat kepentingan ekonomi. Kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan Australia baik multilateral dan bilateral lebih banyak dimotifasi oleh kepentingan politik. Kerjasama AUSFTA, ANZUS, dan kerjasama-kerjasama lainnya dilakukan berdasarkan kepentingan politik. Sejak masa kepemimpinan Presiden Howard seperti yang dijelaskan Capling dalam tulisannya bahwa, hubungan kerjasama Australia dengan Amerika didorong oleh keinginan kuat untuk menjaga hubungan politik dan kedekatannya dengan Amerika (Capling, 2008).

Menjaga hubungan dan kedekatan dengan Amerika selalu menjadi fokus utama Australia. Secara khusus kepentingan kerjasama dengan Amerika didorong oleh kepentingan politik dan keamanan sebagai aliansi utama, dengan mengesampingkan kepentingan ekonomi (Ravenhill A. C., 2011). Seperti yang tertulis dalam *foreign policy white paper*, keberadaan U.S. penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan dikawasan, demi menjaga dan meningkatkan potensi ekonomi (Trade D. o., 2017). Menariknya bahwa hubungan kedua negara mendorong Australia untuk turut mendukung dan mengikuti segala kepentingan dan kebijakan yang dibuat Amerika. Salah satu dari beberapa kebijakan dan kerjasama adalah perjanjian TPP yang dikeluarkan oleh pemerintahan Obama dan diikuti oleh Australia (Wright, 2015).

Keikutsertaan Australia dalam TPP dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kebijakan untuk mengikuti Amerika. Hal ini turut dikemukakan oleh Capling dalam tulisannya mengenai Australia sebagai negara yang cenderung mengikuti arus, yang dalam hal ini mengikuti Amerika masuk ke TPP (Capling, 2008). Sehingga dapat dikatakan bahwa keikutsertaan Australia dalam perjanjian TPP

didorong oleh kepentingan politik yang cukup besar. Selain itu, dalam tulisannya Capling mengemukakan bahwa *Political* dimaknai sebagai kepentingan politik domestik (Capling, 2008). Dalam hal ini kepentingan politik domestik Australia tersusun dan diimplementasikan kedalam kebijakan politik luar negeri dan perdagangan Australia. Dengan disatukannya urusan politik luar negeri dan perdagangan dalam satu kementerian (DFAT), menjadikan kepentingan politik selalu lebih dominan di setiap kebijakan luar negeri khususnya terkait ekonomi dan perdagangan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai dampak ekonomi, jika TPP berjalan menurut beberapa penelitian yang dilakukan IMF dan *World Bank* tidak memberikan peningkatan ekonomi bagi Australia. Kegiatan ekspor akan turut berpengaruh, salah satunya bagi industri farmasi yang termasuk komoditas ekspor Australia dapat dirugikan jika TPP berjalan. Kerugian yang dapat ditimbulkan tersebut akan turut berpengaruh bagi pasar domestik, mengingat masih adanya kebijakan perlindungan yang diterapkan pemerintah Australia terhadap beberapa produk seperti agrikultur, tekstil, dan lainnya (Anderson, 2020). Dengan adanya aturan dalam TPP mengenai pengurangan dan penghapusan hambatan baik tarif dan non-tarif akan sangat berdampak pada produk-produk tersebut.

Jika melihat langkah yang dipilih pemerintah Australia untuk bertahan dalam TPP setelah ditinggalkan Amerika. Tampaknya berbagai dampak negatif tersebut tidak menjadi halangan dan hambatan. Secara garis besar, apa yang dijanjikan dan didapatkan dalam TPP searah dengan berbagai kepentingan dan tujuan politik Australia yang tersusun dalam draft *white paper*. Draft yang

tersusun berdasarkan kepentingan politik tersebut bertujuan untuk mewujudkan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang aman, sejahtera, dan sebagai fokus utama Australia yaitu untuk membangun dan meningkatkan hubungan kerjasama antar negara dalam kawasan mengingat terdapat potensi ekonomi yang cukup besar didalamnya (Trade D. o., 2017).

Sebagai negara dengan tradisi liberal yang cukup kuat, keikutsertaannya dalam TPP menjadi sinyal kuat bahwa Australia berpegang teguh pada komitmennya untuk menjalankan aturan-aturan internasional. Hal ini searah dengan apa yang telah tertulis dalam *white paper* sebagai salah satu tujuan Australia. Keberadaan TPP yang sejalan dengan berbagai tujuan Australia, menjadikannya tepat sebagai sebuah alat politik untuk merealisasikan kepentingan politik luar negeri. Kepentingannya untuk menghadirkan pasar bebas sesuai ketentuan internasional dan paham liberal menjadi sangat penting, dengan berperan dalam mengambil tindakan untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan dalam perdagangan melalui TPP. Hal ini tentunya secara perlahan akan berdampak besar bagi industri dan bisnis Australia (Commission P. , 2017).

3.3 *Strategic*: TPP Sebagai Perjanjian Dagang Yang Strategis Bagi Masa Depan Australia

Kepentingan politik dan tujuan strategis merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap kebijakan dan kerjasama memiliki tujuan strategis yang ingin dicapai. Begitupun dengan Australia yang memiliki tujuan strategis dibalik keberadaannya dalam perjanjian TPP. Secara garis besar keikutsetaan Australia dalam TPP dipengaruhi oleh kepentingan politik yang kuat. Seperti yang

dijelaskan sebelumnya bahwa TPP merupakan alat yang tepat untuk mewujudkan kepentingan politik Australia. Dengan berbagai prospek ekonomi dan politik strategis menarik yang ditawarkan TPP, keikutsertaan Australia tidak hanya untuk mempertahankan akses pasar tetapi juga mempertahankan dan memperluas perannya di kawasan Indo-Pasifik bahkan sekitarnya.

Seperti halnya kerjasama antara Australia-Amerika yang secara ekonomi tidak terdapat keuntungan yang signifikan, namun dipengaruhi oleh tujuan strategis yaitu menjaga hubungan baik dengan Amerika untuk kepentingan keamanan. Kerjasama yang terjalin sejak 2005 dalam AUSFTA memberikan pengaruh kecil bahkan tidak untuk pertumbuhan ekonomi dan akses pasar bagi Australia (Armstrong, 2015). Hal tersebut terlihat juga dalam keikutsertaan Australia dalam TPP, sebelum keluarnya Amerika dari perjanjian. Namun, keluarnya Amerika dan berbagai asumsi negatif ekonomi terhadap TPP tidak menghalangi langkah Australia bertahan didalamnya.

Disatukannya urusan mengenai politik luar negeri dan perdagangan berdampak besar bagi kebijakan-kebijakan kerjasama perdagangan Australia. Kepentingan dan keuntungan ekonomi tidak menjadi kepentingan utama dari berbagai kebijakan perdagangan, melainkan hanya dijadikan sebagai alat untuk mengejar kepentingan politik dan tujuan strategis (Capling, *Australia's Trade Policy Dilemmas*, 2008). Hal ini telah dilakukan oleh Australia diberbagai kerjasama yang diikutinya terutama kerjasama-kerjasama yang berkaitan dengan Amerika. Dapat dikatakan keuntungan ekonomi tidak menjadi fokus utama Australia di TPP untuk saat ini. Namun, untuk prospek kedepan TPP adalah

sebuah perjanjian kerjasama yang strategis bagi Australia dengan berbagai dominasi kepentingan politik dalam kebijakan perdagangan.

Setiap negara pasti menginginkan adanya pertumbuhan dan peningkatan ekonomi khususnya Australia. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kerjasama dengan mitra seperti yang dilakukan Australia melalui CANATA, JAEPA, ACLFTA, SAFTA, MAFTA, ANZCERTA, PAFTA, dan lainnya (DFAT, 2020). Kerjasama tersebut dilakukan dengan negara-negara anggota TPP, dengan beberapa telah mencapai kesepakatan untuk perdagangan bebas. Seperti data yang disampaikan peneliti IMF Cerdeiro dengan mensimulasikan pendapatan, bahwa liberalisasi pasar yang dilakukan dalam TPP tidak akan memberi dampak signifikan bagi perekonomian Australia (Cerdeiro, 2016). Dengan kata lain keberadaan TPP yang dapat mewujudkan perdagangan bebas antar anggota tidak terlalu berpengaruh besar bagi Australia yang telah mencapai hal tersebut terlebih dahulu. Namun, dari hal tersebut dan dampak negatif terhadap ekonomi memperlihatkan bahwa tujuan utama Australia bertahan dalam TPP bukan sekedar kepentingan ekonomi.

Kerjasama antara Australia dan Jepang sebelum dijalankannya JAEPA, hanya fokus pada kerjasama yang didasari pada kepentingan politik dan tujuan strategis (Capling, 2008). Kerjasama awal antara Jepang-Australia belum mencapai perdagangan bebas, sehingga masih terdapat kebijakan proteksi. Dengan adanya tujuan strategis kerjasama akhirnya mencapai perdagangan bebas pada 2015 melalui JAEPA. Hal ini dapat terulang dalam TPP mengingat tidak semua negara anggota bekerjasama dalam perdagangan bebas dengan Australia. Jika TPP dapat berjalan, maka kerjasama dengan Meksiko dan Kanada akan

semakin kuat dan meningkatkan akses pasar Australia. Mengingat kedua negara tersebut belum membuka kerjasama perdagangan bebas dengan Australia.

Bertahannya Australia dalam TPP tidak hanya dapat dilihat melalui kepentingan politik. Lebih jauh lagi, keberadaan Australia dalam TPP karena dorongan dari tujuan strategis. TPP sebagai sebuah kerjasama besar yang melibatkan kawasan yang cukup luas dengan akses pasar dan sumber daya yang besar, menjadi salah satu kerjasama yang sangat strategis. Australia dengan berbagai kepentingannya membutuhkan TPP sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan dalam jangka Panjang, mengingat TPP masih terus berkembang. Dengan wacana kemudahan dalam menambah anggota yang dapat dilakukan, TPP akan menjadi kerjasama yang sangat strategis bagi Australia (Zuraya, 2017).

Jika melihat kebelakang bahwa banyak dari kerjasama Australia yang dibangun dari tujuan strategis yaitu untuk mencapai perdagangan bebas dan stabilitas keamanan. Namun, kerjasama-kerjasama tersebut masih sebatas pada kerjasama bilateral. TPP sebagai kerjasama multilateral akan menjadi batu loncatan yang tepat bagi Australia untuk mendorong kerjasama-kerjasama multilateral lain seperti APEC dan RCEP berjalan sesuai dengan kepentingannya (Ravenhill J. , 2016). Kedepannya perkembangan dari kerjasama-kerjasama tersebut akan mendorong peningkatan ekonomi bagi Australia. Hal ini sejalan dengan kepentingan politik luar negeri Australia yang ditulis dalam *white paper* yaitu untuk menjaga komitmen terhadap aturan internasional dan menjaga stabilitas kawasan (Trade D. o., 2017).

Selain itu, paska keluarnya Amerika dari TPP membuat posisi negara besar dan kuat menjadi kosong. Hal ini dapat mendorong peran dan posisi dari

Australia semakin menguat. Terbukti dalam sebuah pertemuan antara Australia dan Jepang yang membahas mengenai keberlanjutan dan regulasi TPP, setelah keluarnya Amerika (Sebayang, 2018). Kedua negara yang menjadi anggota TPP tersebut mulai dominan dalam TPP, khususnya Australia yang memiliki kepentingan besar dalam TPP. Dengan begitu semakin memperlihatkan peran dan posisinya dalam merealisasikan TPP untuk menjadi kerjasama terbesar yang dapat berjalan dengan baik. Hal ini akan berdampak pada terbangunnya kepercayaan mitra-mitra kepada Australia, dan mendatangkan mitra untuk bekerjasama dengan Australia dalam TPP dan kerjasama lain.

Dengan keteguhan Australia pada kepentingan menjaga dan memperluas akses pasar akan mempermudah dalam meningkatkan jumlah mitra kerjasama. Peran dalam menjaga keamanan, kesejahteraan, dan potensi kawasan dan dunia internasional akan terbangun dengan baik. Tujuan untuk menjaga komitmen dengan aturan internasional dan membangun kerjasama perdagangan bebas dengan seluruh mitra dapat tercapai. Dengan begitu, setiap kepentingan politik Australia akan terimplementasikan dengan baik, peningkatan ekonomi, dan pendapatan akan bertambah seiring berjalannya kerjasama-kerjasama tersebut.

Secara garis besar bertahannya Australia dalam TPP dapat dijelaskan dan dipahami dengan ketiga motif *defensive*, *political*, dan *strategic*. Keikutsertaan Australia cukup jelas diawal berkaitan dengan keberadaan Amerika dalam TPP. Namun setelah keluarnya Amerika, Australia tetap bertahan dalam TPP karena adanya pengaruh politik seperti yang telah teridentifikasi diatas. Kepentingan politik luar negeri Australia yang tertulis dalam *white paper* menjadi dasar dari keikutsertaan dan bertahannya Australia dalam TPP. Kepentingan untuk

melindungi pasar, stabilisasi ekonomi kawasan, mengimplementasikan kepentingan dan kebijakan politik, mempertahankan peran dan posisi dikawasan dan dunia internasional, dan yang terakhir adalah tujuan strategis dalam menjaga potensi ekonomi dan kerjasama dengan mitra-mitra dagang.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

TPP sebagai perjanjian kerjasama perdagangan bebas multi-kawasan yang terbesar mulai ditandatangani oleh keseluruhan anggota pada 2015. Australia, Selandia Baru, Jepang, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Vietnam, Meksiko, Chili, Peru, Amerika Serikat, dan Kanada adalah keanggotaan awal TPP, hingga pada 2017 tepatnya dibulan Januari Amerika Serikat dibawah kepemimpinan D. Trump memilih untuk menarik diri dari perjanjian. Dengan nilai hampir 37% perdagangan didunia dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam TPP. Namun, masalah muncul terkait dengan harmonisasi kebijakan yang akan sulit dilakukan negara-negara anggota untuk beradaptasi pada peraturan perdagangan bebas yang dikehendaki dalam TPP.

Australia sebagai salah satu negara anggota TPP menjadi negara dengan pendapatan yang cukup kecil dalam TPP melalui proyeksi dan simulasi data yang dilakukan oleh peneliti-peneliti IMF dan *World Bank*. Dari penelitian yang dilakukan, Australia menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat sebagai negara yang memperoleh keuntungan ekonomi paling kecil dari perjanjian TPP dengan angka pendapatan sekitar 0,7%. Selain itu, masalah harmonisasi dan pembuatan kebijakan terkait TPP memakan waktu mengingat adanya tahapan dan proses panjang bagi pemerintah Australia untuk merumuskan suatu kebijakan.

Masalah lain muncul terkait dampak TPP, yang berpengaruh pada kondisi domestik Australia. Industri farmasi sebagai salah satu komoditas ekspor akan sangat terdampak oleh regulasi-regulasi yang dibuat dalam TPP mengenai

hambatan perdagangan dan HAKI. Regulasi tersebut memungkinkan produk impor masuk dan merusak ekosistem pasar farmasi domestik dengan adanya persaingan dalam menciptakan obat dengan harga paling rendah untuk dikonsumsi pasar. Selain itu, TPP yang memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, justru dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja sekitar 771.000 orang termasuk bagi Australia.

TPP sebagai kerjasama memiliki tujuan dalam memfasilitasi negara anggota untuk melakukan perdagangan bebas. Secara garis besar beberapa negara anggota telah melakukan kerjasama perdagangan bebas, namun terdapat beberapa negara yang masih menerapkan kebijakan proteksi dalam perdagangan. Hal ini juga menjadi tantangan dan sekaligus hambatan bagi tercapainya TPP. Berbeda dengan Australia yang melihat ini sebagai peluang untuk memastikan terwujudnya perdagangan bebas antar anggota perjanjian TPP.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model ekonomi yang dikembangkan Ann Capling dengan variabel *defensive*, *political*, dan *strategic* untuk membantu menganalisa kasus tersebut dan menjawab rumusan masalah. Model ekonomi tersebut cenderung lebih berfokus pada pengaruh politik dalam pembuatan dan pengimplementasian berbagai kebijakan ekonomi dan perdagangan. Australia sebagai objek utama penelitian termasuk kedalam negara yang menyatukan antara urusan politik dan perdagangan, khususnya politik luar negeri dalam satu kementerian. Penyatuan ini sangat berpengaruh pada setiap kebijakan luar negeri dan perdagangan Australia yang didominasi oleh kepentingan politik.

Secara *defensive* bertahannya Australia dalam TPP sebagai cara pemerintah untuk mempertahankan pasar dan disisi lain dapat membuka peluang pasar baru. Ditengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil mendorong Australia untuk terlebih dahulu mengamankan peluang ekonomi dengan mempertahankan dan mengembangkan akses pasar melalui kerjasama TPP. Dengan ruang lingkup yang cukup besar TPP dapat mengakomodir kepentingan Australia untuk mempertahankan akses pasar terhadap anggota lain yang telah terjalin dalam kerjasama bilateral, dan mengembangkan kerjasama pasar dengan mitra lain dalam TPP.

Kepentingan politik Australia dalam TPP terlihat cukup jelas karena dikesampingkannya urusan ekonomi. Sebagai negara yang menyatukan urusan politik dan perdagangan, Australia dengan *foreign policy white paper* melihat TPP sebagai kerjasama yang dapat mengakomodir kepentingannya dalam menjaga komitmen dengan aturan internasional dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. TPP secara regulasi sesuai dengan syarat WTO mengenai kerjasama perdagangan bebas dengan kebijakan mengurangi dan menghapus segala hambatan dalam perdagangan. Disisi lain TPP sebagai kerjasama yang fokus pada kawasan pasifik, menjadikannya alat yang tepat untuk mewujudkan dan merealisasikan segala kepentingan politik Australia terkait peran dan posisinya sebagai negara besar dikawasan dan dunia internasional.

Selain itu, sebagai negara yang berdaulat tentunya Australia membutuhkan kerjasama yang memiliki manfaat kedepannya. TPP dilihat sebagai kerjasama yang dapat dijadikan tujuan strategis untuk jangka panjang. Seperti halnya kerjasama-kerjasama Australia dengan beberapa mitra seperti Amerika dan

Jepang. Kerjasama Australia dengan Amerika tidak memberikan keuntungan ekonomi, dimana hal ini tidak menjadi fokus Australia karena adanya tujuan strategis yang penting yaitu terkait keamanan. Sama halnya dengan kerjasama Australia-Jepang yang dahulu hanya terkait peran dan keberadaannya di Asia timur. Namun, kerjasama tersebut telah mencapai perdagangan bebas yang mendatangkan keuntungan bagi Australia.

TPP untuk saat ini hanya diperhitungkan dan diproyeksikan memberikan dampak negatif bagi ekonomi Australia. Hal ini tidak menjadi alasan Australia untuk keluar dari perjanjian karena terdapat tujuan strategis, kepentingan politik, dan kepentingan pasar didalam TPP. Untuk jangka panjang, jika TPP dapat berjalan maka akses pasar bagi Australia akan semakin besar dengan peran dan posisi negara dikawasan semakin kuat. Rencana penambahan anggota baru TPP akan menjadi keuntungan bagi Australia untuk memperluas lagi dominasi dan pasarnya didunia internasional.

Berdasarkan analisis penulis dengan ketiga variabel utama yaitu *defensive*, *political*, dan *strategic* mendapatkan hasil untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai kepentingan bertahannya Australia didalam perjanjian TPP. Australia secara tidak langsung mengesampingkan urusan ekonomi didalam TPP. Kepentingan politik terlihat lebih dominan dalam kebijakan Australia dalam keikutsertaan dan bertahan dalam TPP. Tujuan dari kepentingan politik yang dimiliki Australia menurut analisis penelitian memiliki tujuan akhir untuk memperlihatkan peran dan posisi Australia di dunia internasional. Selain itu, dalam jangka panjang TPP tidak hanya akan memperluas

akses pasar Australia tetapi akan berdampak pada peningkatan ekonomi seiring dengan semakin luas pasar dan banyaknya mitra dagang Australia.

4.2 Rekomendasi

Dengan mengacu pada analisis dan kesimpulan penelitian, penulis berhasil menemukan kepentingan-kepentingan politik yang mendorong Australia bertahan dalam TPP. Namun, peneliti menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam tulisan ini. Peneliti hanya berfokus pada pengaruh kepentingan politik dibalik bertahannya Australia dalam perjanjian TPP. Maka dengan demikian, penulis berharap dan merekomendasikan agar peneliti-peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait dengan keberlanjutan dari perjanjian TPP agar dapat melengkapi penelitian ini, dengan memperhatikan:

1. Keberlanjutan upaya yang dilakukan Australia karena adanya pembaharuan mengenai kerjasama dan regulasi dalam TPP-11 atau CPTPP.
2. Peneliti juga merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk melihat langkah-langkah dan kepentingan terbaru, serta hambatan-hambatan yang akan dihadapi Australia dalam keikutsertaanya di perjanjian TPP. Serta skenario yang akan dihadapkan oleh Australia setelah TPP benar-benar berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Administration, D. o. (2020). *What the TGA regulates*. Dipetik September 16, 2020, dari Australian Government Web site: <https://www.tga.gov.au/what-tga-regulates>
- Amari, A. (2016). The Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement. *Asia-Pacific Review*, 11-20.
- Anderson, K. (2020). Trade Protectionism In Australia: Its Growth And Dismantling. *Journal of Economic Surveys*, 1-24.
- Armstrong, S. (2015, Februari 10). *The Costs of Australia's 'Free Trade' Agreement with America*. Diambil kembali dari Australian Institute of International Affairs Web site: <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-costs-of-australias-free-trade-agreement-with-america/>
- Australia, I. (2019, Februari 11). *IP legislation*. Dipetik September 15, 2020, dari Australian Government Web site: <https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/legislation/ip-legislation>
- Australia, M. (2015, Oktober 6). *TPP a missed opportunity for the Australian Biopharmaceutical Community*. Dipetik Oktober 1, 2018, dari Medicines Australia Web Site: <https://medicinesaustralia.com.au/media-release/tpp-a-missed-opportunity-for-the-australian-biopharmaceutical-community/>
- Australia, R. B. (2020). *Australia and the Global Economy – The Terms of Trade Boom*. Diambil kembali dari Reserve Bank of Australia Web site: <https://www.rba.gov.au/education/resources/explainers/australia-and-the-global->

economy.html#:~:text=Australia%20is%20a%20relatively%20open%2C%20trade%2Dexposed%20economy.&text=For%20example%2C%20an%20increase%20in,called%20the%20terms%20of%20trade.

Baldwin, R. E. (2011). 21st Century Regionalism: Filling the gap between 21st century trade and 20th century trade rules. *WTO Staff Working Paper*.

Canada, G. o. (2019, June). *High Commission of Canada in Australia: Canada - Australia Relations*. Dipetik September 15, 2020, dari Government of Canada Web site: https://www.canadainternational.gc.ca/australia-australie/bilateral_relations_bilaterales/canada_australia-australie.aspx?lang=eng

Capling, A. (2008). Preferential Trade Agreements As Instruments Of Foreign Policy: An Australia–Japan Free Trade Agreement and Its Implications For The Asia Pacific Region. *The Pacific Review*, 27-43.

Capling, A. (2008). Australia's Trade Policy Dilemmas. *Australian Journal of International Affairs*, 229-244.

Cerdeiro, D. A. (2016). *IMF Working Paper, Estimating the Effects of the Trans-Pacific Partnership (TPP) on LAC*. International Monetary Fund.

Cerdeiro, D. A. (2016, Mei 23). *IMF WORKING PAPERS: Estimating the Effects of the Trans-Pacific Partnership (TPP) on Latin America and the Caribbean (LAC)*. Dipetik September 18, 2020, dari International Monetary Fund Web site: <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Estimating-the-Effects-of-the-Trans-Pacific-Partnership-TPP-on-Latin-America-and-the-43917>

- Chowdury, J. K. (2016). *The Trans-Pacific Partnership Agreement: Some Critical Concerns*. New York: Columbia University.
- Commission, A. T. (2020). *Export markets - Canada: Tariffs and regulations*. Dipetik September 15, 2020, dari Australian Government Web Site: <https://www.austrade.gov.au/Australian/Export/Export-markets/Countries/Canada/Doing-business/Tariffs-and-regulations>
- Commission, A. T. (2020). *Why Australia: Global Ties*. Diambil kembali dari Australian Government Web site: <https://www.austrade.gov.au/International/Invest/Why-Australia/Global-Ties>
- Commission, P. (2017, Juli 19). *Rising protectionism: challenges, threats and opportunities for Australia*. Diambil kembali dari Australian Government Web site: <https://www.pc.gov.au/research/completed/rising-protectionism/rising-protectionism.pdf>
- Complexity, T. O. (2020). *Australia: About, Product Trade*. Diambil kembali dari Observation of Economic Complexity Web site: <https://oec.world/en/profile/country/aus/>
- Crean, S. (2008, November 26). Australia to join efforts to promote free trade in the Asia Pacific, Ministerial Statement to the Australian House of Representatives. Australia.
- DFAT. (2011, Februari). *Fifth round of Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) Negotiations*. Dipetik Juni 12, 2020, dari Australian Government, Departement of Foreign Affairs and Trade Web Site: <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in->

force/cptpp/negotiations/Pages/fifth-round-of-trans-pacific-partnership-agreement-tpp-negotiations

DFAT. (2020). *Australia's free trade agreements (FTAs)*. Diambil kembali dari Australian Government Web site:

<https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/Pages/trade-agreements>

Fiott, D. (2016). The Trans-Pacific Partnership: Defence, Industry and Strategy. *The International Spectator*, 119-130.

Frindos, R. (2017, Juni 21). *Dollar Australia (AUD), Komoditas, dan Defisit Kronis*. Diambil kembali dari Frindos On Finance Web site:

<https://www.frindosonfinance.com/2017/06/21/dollar-australia-aud-komoditas-dan-defisit-kronis/>

Gleeson, J. L. (2016). The Trans Pacific Partnership Agreement and Pharmaceutical Regulation in Canada and Australia. *International Journal of Health*, 1-17.

Gouw, W. (2018, September 10). *Perkembangan Ekonomi Dunia: Resesi atau Keseimbangan Baru?* Dipetik September 16, 2020, dari CNBC Indonesia Web site: <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20180910171438-14-32532/perkembangan-ekonomi-dunia-resesi-atau-keseimbangan-baru>

Government, A. (2017). *Foreign Policy White Paper: Overview*. Dipetik September 17, 2020, dari Australian Government Web site:

<https://www.dfat.gov.au/publications/minisite/2017-foreign-policy-white-paper/fpwhitepaper/foreign-policy-white-paper/overview.html>

Group, W. B. (2016, Januari 06). *Global Economic Prospects, January 2016 : Spillovers Amid Weak Growth*. Dipetik September 19, 2020, dari World

Bank Group: Open Knowledge Repository:

<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23435>

Group, W. B. (2016). *TOPICAL ISSUE: Potential Macroeconomic Implications*. World Bank.

Group, W. B. (2017). *Global Economic Prospects, January 2017 Weak Investment In Uncertain Times*. Washington, DC: World Bank.

Hardy, J. M. (2019, November 11). *Peran Australia di Indo-Pasifik*. Diambil kembali dari INDO-PACIFIC DEFENSE FORUM: <https://ipdefenseforum.com/id/peran-australia-di-indo-pasifik/>

Japan, M. o. (2015, Januari 15). *Joint Statement on the Entry into Force of the Agreement between Japan and Australia for an Economic Partnership*. Dipetik September 16, 2020, dari Ministry of Foreign Affairs of Japan Web site: https://www.mofa.go.jp/page3e_000283.html

Kampark, B. (2016). Radical Transparency in Geopolitical Economy: WikiLeaks, Secret Diplomacy and the Trans-Pacific Partnership Agreement. *Journal of Global Faultlines*, 1-15.

Lim, D. E. (2012). The Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) Negotiations: Overview and Prospect.

Malik, M. (2006). Australia, America, and Asia. *Pacific Affairs*, 587-595.

News, B. (2017, Januari 23). *TPP: What is it and why does it matter?* Diambil kembali dari BBC News Web site: <https://www.bbc.com/news/business-32498715>

Post, T. W. (2018, April 13). *A timeline of Trump's complicated relationship with the TPP*. Dipetik Oktober 1, 2018, dari The Washington Post Web Site:

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/04/13/a-timeline-of-trumps-complicated-relationship-with-the-tpp/?noredirect=on&utm_term=.2fb72f629c2d

- Purnomo, H. (2019, September 3). *Perlu Diwaspadai, Begini Mengerikannya Kondisi Ekonomi Global*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia Web site: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190902182454-4-96607/perlu-diwaspadai-begini-mengerikannya-kondisi-ekonomi-global/1>
- Ranald, P. (2011). The Trans-Pacific Partnership Agreement: Contradictions on Australia and in the Asia Pacific Region. *The Economic and Labour Relations Review*, 81-98.
- Ravenhill, A. C. (2011). Multilateralising regionalism: what role for the Trans-Pacific Partnership Agreement? *The Pacific Review*, 553-575.
- Ravenhill, A. C. (2015). Australia's flawed approach to trade negotiations: and where do we sign ? *Australian Journal of International Affairs*, 496-512.
- Ravenhill, J. (2008). The move to preferential trade on the western Pacific rim. *Australian Journal of International Affairs*, 129-150.
- Ravenhill, J. (2016). The political economy of the Trans-Pacific Partnership: a '21st Century' trade agreement ? . *New Political Economy*, 573-594.
- Researchers, A. (2017, November 23). *In Brief: Foreign Policy White Paper*. Dipetik juli 13, 2020, dari Australian Institute of International Affairs Web Site: <http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/issue-white-paper/>
- Robertson, D. (1997). Reciprocity and Protectionism in Australia's Trade Policy. *Agenda*, 135-142.

- Samosir, H. A. (2017, Januari 24). *Selamatkan TPP, Australia Buka Kesempatan China Bergabung*. Diambil kembali dari CNN Indonesia Web site: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170124124627-134-188523/selamatkan-tpp-australia-buka-kesempatan-china-bergabung>
- Sebayang, R. (2018, Januari 18). *Australia dan Jepang akan Teken Perjanjian Pengganti TPP*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia Web site: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180118154618-4-1914/australia-dan-jepang-akan-teken-perjanjian-pengganti-tpp>
- Sheargold, T. V. (2016). *The Trans-Pacific Partnership*. Melbourne: De Gruyter.
- Stamoulis, A. (2013). Trading Away the Future: An Analysis of the Trans-Pacific Partnership. *New Labour Forum*, 30-37.
- Tang, E. (2020, Maret 16). *Economic Analisis: Australia - A solid trade performance*. Diambil kembali dari Australian Government Web site: <https://www.austrade.gov.au/news/economic-analysis/australia-a-solid-trade-performance>
- Taylor, A. (2018, April 13). *A timeline of Trump's complicated relationship with the TPP*. Dipetik September 15, 2020, dari The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/04/13/a-timeline-of-trumps-complicated-relationship-with-the-tpp/>
- Trade, A. G. (2018, Agustus). *Japan-Australia Economic Partnership Agreement*. Dipetik September 17, 2020, dari Australian Government Web site: <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/jaepa/fact-sheets/Pages/jaepa-fact-sheet-outcomes-at-a-glance>

- Trade, D. o. (2015, October 6). *TPP text and associated documents*. Dipetik September 15, 2020, dari Australian Government Web site: <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/tpp/Pages/tpp-text-and-associated-documents>
- Trade, D. o. (2015, Oktober 6). *Tpp Text and Associated Documents: Technical Barriers to Trade*. Dipetik September 18, 2020, dari Australian Government Web site: <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/8-technical-barriers-to-trade.pdf>
- Trade, D. o. (2017). *Foreign Policy White Paper: Overview*. Dipetik juli 13, 2020, dari Australian Government Web Site: <https://www.dfat.gov.au/publications/minisite/2017-foreign-policy-white-paper/fpwhitepaper/foreign-policy-white-paper/overview.html>
- Trade, D. o. (2017). *Foreign Policy White Paper: Prime Minister's Introduction*. Diambil kembali dari Australian Government Web site: <https://www.dfat.gov.au/publications/minisite/2017-foreign-policy-white-paper/fpwhitepaper/foreign-policy-white-paper/prime-ministers-introduction.html>
- Wright, D. (2015, November 15). *Obama administration releases text of TPP trade deal*. Diambil kembali dari CNN News Web site: <https://edition.cnn.com/2015/11/05/politics/tpp-text-released/index.html>
- Zuraya, F. N. (2017, Januari 24). *Australia Tawarkan Cina dan Indonesia untuk Gabung TPP*. Diambil kembali dari Republika Web site: <https://republika.co.id/berita/ok9okr383/australia-tawarkan-cina-dan-indonesia-untuk-gabung-tpp>

